



**KEPOLISIAN
REPUBLIK
INDONESIA**

Diterbitkan oleh:
DINAS PENERANGAN POLRI
JUNI, 1976

Sampul :
Markas Besar Kepolisian R.I. di Kebayoran, Jakarta.

PENDAHULUAN



[Handwritten signature]

_____ sekilas lintas
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

PENDAHULUAN

Idee untuk menerbitkan booklet ini bertolak dari kebutuhan kita akan buku yang cukup representatif tentang Kepolisian R.I. yang dapat diberikan pada tamu-tamu POLRI, terutama tamu-tamu dari Luar Negeri.

Referensi untuk penyusunan buku ini diambil dari Surat-2 Keputusan maupun Data-2 Authentik dari HANKAM maupun dari MABAK, diolah secara pendek dan populer, disertai dengan photo - photo yang dikumpulkan dari lingkungan MABAK, Komdak Metro Jaya dan AKABRI Bagian Kepolisian Sukabumi.

Karena booklet ini disusun secara pendek dan populer, maka tidaklah mungkin untuk memasukkan kedalamnya seluruh bagian dan kegiatan POLRI, sehingga kekurangan tetap akan terdapat didalamnya.

Namun harapan Penyusun agar dengan usaha yang sederhana ini dapat dicapai lebih banyak pengertian dari masyarakat terhadap POLRI melalui pengenalan akan tugas-tugas dan kegiatan POLRI yang secara maksimal ingin diketengahkan melalui penerbitan booklet ini.

DRS SIDHARTO DANUSOEBROTO SH
KOLONEL POLISI NRP. 36060001

KEPALA DINAS PENERANGAN POLRI

SAMBUTAN KEPALA KEPOLISIAN R.I.

Saudara-2 Pembaca yang budiman

Kami merasa ikut bergembira denganditerbitkannya Booklet ini, yang akan memberikan gambaran secara sekilas lintas mengenai Kepolisian Republik Indonesia, yang meliputi berbagai kegiatan dan aspek, terutama yang menyangkut segi operasionil.

Penerbitan ini merupakan produk yang masih belum sempurna, belum menggambarkan secara keseluruhan mengenai Kepolisian R.I., namun menurut hemat kami dari Booklet yang dilengkapi dengan gambar-2 yang terpilih ini, para Pembaca akan bisa mendapatkan gambaran secara garis besar, apa dan bagaimana POLRI melaksanakan tugas, sarana dan peralatan yang digunakan.

Dengan mendapatkan gambaran secara garis besar ini, diharapkan para Pembaca akan dapat mengenal dan menghayati kehadiran POLRI sebagai unsur ABRI ditengah-tengah masyarakat, dengan tugas pokok menegakkan hukum dan membina keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kami berpendapat bahwa Booklet yang sederhana ini akan bisa menjadi bacaan yang sangat bermanfaat terutama bagi para Pembaca yang ingin lebih mengenal Kepolisian R.I.

Dengan mengenal secara lebih baik mengenai Kepolisian R.I. maka diharapkan akan timbul support dan partisipasi masyarakat demi kelancaran dan suksesnya tugas-tugas POLRI.-

DRS. WIDODO BUDIDARMO
LETNAN JENDRAL POLISI

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN	5
SAMBUTAN KEPALA KEPOLISIAN R.I.	7
1 SEJARAH	11
Periode Perang Kemerdekaan tahun 1945-1950	
Periode Demokrasi Liberal tahun 1950-1959	
Periode Demokrasi Terpimpin tahun 1959-1965	
Periode Pembinaan Orde Baru tahun 1965	
2 ORGANISASI	23
Kedudukan	
Tugas Pokok	
Fungsi - fungsi	
Bentuk Organisasi	
Susunan Organisasi	
3 KESAMAPTAAN DAN PEMBINAAN MASYARAKAT	31
Samapta Bhayangkara Kepolisian	
Lalu Lintas Kepolisian	
Perairan dan Udara Kepolisian	
Pembinaan Masyarakat Kepolisian	
Brigade Mobil Kepolisian	
4 A. PENINDAKAN KEPOLISIAN	61
Reserse Kepolisian	
Identifikasi Kepolisian	
Laboratorium Kepolisian	
Psikologi Kepolisian	
Hukum Kepolisian	
Interpol	
B. INTELIJEN KEPOLISIAN	72
Intelijen Kepolisian	
Pengamanan Kepolisian	
5 PENDIDIKAN DAN LATIHAN	73
Pendidikan Pembentukan	
Pendidikan Pengembangan Umum	
Pendidikan Pengembangan Spesialisasi	
Pendidikan Peralihan	
6 LAIN-LAIN	87
Komunikasi dan Elektronika Polri	
Computer	
Pakaian Seragam Polri	
Kepangkatan Polri	
Statistik	

SEJARAH 1





SEJARAH SINGKAT DAN PERKEMBANGAN KEPOLISIAN R.I.

Tulisan sejarah singkat Kepolisian R.I ini adalah sekedar untuk memberi gambaran tentang perkembangan Kepolisian R.I. dalam empat periode, yaitu :

1. Periode Perang Kemerdekaan th. 1945-1950
2. Periode Demokrasi Liberal th. 1950-1959
3. Periode Demokrasi Terpimpin th. 1959-1965
4. Periode Pembinaan Orde Baru th. 1965-1975

PERIODE PERANG KEMERDEKAAN TAHUN 1945-1950

Tidak lama sesudah Bangsa Indonesia memproklamkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 maka pada tanggal 29 September 1945 oleh Presiden R.I telah diangkat sebagai Kepala Kepolisian Negara pertama (disingkat K.K.N) R.S SOEKANTO TJOKRODIATMODJO.

Dengan adanya Tentara Inggris di Jakarta untuk menawan Tentara Jepang yang kalah perang dalam Perang Dunia II, kesempatan itu dipakai oleh Belanda untuk berusaha kembali menguasai Indonesia, dengan jalan ikut mendarat bersama pasukan Inggris di Jakarta dan Surabaya.

Dalam waktu singkat Belanda dapat memperkuat kedudukannya dan mengambil alih kekuasaan dari Tentara Inggris yang berada di Jakarta.

Berhubung keadaan politik di Jakarta tidak mengizinkan, maka dalam bulan Februari 1946 Jawatan Kepolisian Negara mengikuti Kementerian Dalam Negeri memindahkan kedudukannya ke Purwokerto (Jawa Tengah).



Satuan2 Kepolisian R.I. pada jaman Revolusi ikut dalam parade besar yang diadakan pada tahun 1948 di Jogjakarta, Ibu Kota Republik Indonesia pada waktu itu.



Untuk kelancaran pembangunan Kepolisian maka pada tanggal 1 Juli 1946, Jawatan Kepolisian Negara dikeluarkan dari lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan dijadikan Jawatan tersendiri langsung dibawah pimpinan Perdana Menteri.

Peristiwa tersebut sekarang ini, tiap tahun diperingati sebagai Hari Bhayangkara.

Agresi Belanda pertama terhadap wilayah R.I di Jawa Tengah pada tanggal 21 Juli 1947 disusul dengan pemberontakan PKI bulan September 1948 di Madiun melibatkan Kepolisian dalam tugas2 pertahanan dan penumpasan pemberontakan disamping menunaikan tugas-tugas konvensionalnya.

Pada bulan September 1947 Wakil K.K.N dan beberapa Kepala Bagian ditangkap Belanda dan kemudian pada tanggal 1 Desember 1947 Jawatan Kepolisian Negara dipindahkan kedudukannya ke Yogyakarta.

Pada tanggal 18 Desember 1948, Belanda melakukan agresinya yang kedua, dan berhasil menduduki Ibu Kota R.I, yaitu Yogyakarta. Polisi dan pasukan bersenjata lainnya meninggalkan Ibu Kota dan dari luar kota ikut melakukan perang gerilya terhadap kedudukan pasukan Belanda dikota-kota.

Persetujuan "ROEM - ROYEN" pada tanggal 7 Mei 1949 mengharuskan Belanda menarik kembali semua pasukanya dari wilayah R.I terutama dari Ibu Kota Yogyakarta.

Beberapa orang Polisi yang berada dikota Yogyakarta yang tetap loyal kepada Pemerintah R.I telah menerima tanggung jawab tentang keamanan dan ketertiban dari Pemerintah Belanda.

Segera diadakan pula hubungan dengan pimpinan Kepolisian diluar kota untuk memasuki Yogyakarta.



*Jenderal Polisi R.S. Soekanto
Tjokrodiatmodjo,
Kepala Kepolisian Negara
1945 - 1959*



*Jenderal Polisi Soekarno
Djojonagoro,
Kepala Kepolisian Negara
1959 - 1963*



*Mayor Jenderal Polisi Soetjipto
Danoekoesoemo,
Menteri/Panglima Angkatan
Kepolisian
1963 - 1965*

Pada tanggal 27 Desember 1949 pemerintah Belanda mengakui kedaulatan Negara Indonesia dan terbentuklah R.I.S.

Setelah terbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950, Polisi Negara R.I. dilebur dalam susunan Kepolisian Negara yang berpusat di Jakarta, Jawatan Kepolisian Negara di Yogyakarta dihapuskan.

PERIODE DEMOKRASI LIBERAL TAHUN 1950 - 1959

Sebagai realisasi dari pada perjanjian Konperensi Meja Bundar, lahirlah Negara Republik Indonesia Serikat (R.I.S).

Pasukan - pasukan Belanda ditarik dari Indonesia.

Tanggung jawab keamanan diserahkan kepada APRIS dan Polisi R.I.S.

Untuk menyelenggarakan keamanan dan ketertiban dalam Negeri maka Panitia Persiapan Nasional telah menunjuk Sri Sultan Hamengku Buwono ke IX sebagai Koordinator Keamanan, yang kemudian menunjuk lagi R.S SOEKANTO TJOKRODIATMODJO sebagai Kepala Kepolisian R.I.S sedangkan sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia diangkat R. SOEMARTO.

Pada awal Pemerintah R. I sesudah bubarnya Pemerintah R.I.S. (tanggal 17 Agustus 1959) Kepolisian R.I terdiri atas 3 golongan:

1. Kepolisian R.I.S yang merupakan peleburan dari :
 - a. Algemeene Politie (Polisi Umum) yang secara administratif dan organisatoris berada dibawah pimpinan Menteri Dalam Negeri R.I.S.
 - b. Kepolisian di Jawa Tengah (bekas daerah Recomba), Padang, Sabang, Samarinda dan Banjarmasin.
2. Jawatan Kepolisian R.I dibawah Pimpinan Kepala Kepolisian Negara (K.K.N) R.S SOEKANTO TJOKRODIATMODJO yang statusnya berada dibawah Perdana Menteri.
3. Jawatan Kepolisian Negara dari Negara-Negara Bagian R.I.S.

Pada tanggal 19 Januari 1950, R.S SOEKANTO menerima Pimpinan Jawatan Kepolisian R.I.S dari G. VAN NES (Kepala Polisi Umum).

Segera setelah Negara Kesatuan R.I terbentuk, Kepolisian Indonesia dihadapkan kepada kejahatan-kejahatan yang meningkat disegala bidang.

Perlu dicatat dalam hal ini gangguan keamanan seperti pemberontakan2 APRA, DI TIII, PRRI dan PERMESTA dapat ditumpas oleh Angkatan Perang R.I dan dibantu sepenuhnya oleh POLRI.

Kemudian sebagai realisasi Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 No.154/1959 serta surat Menteri Pertama tanggal 12 Agustus 1959 No.23394/59, Kepala Kepolisian Negara sebutannya menjadi Menteri Muda Kepolisian Negara dan menjadi Departemen Kepolisian.

Dengan Ketetapan MPRS No.II/MPRS/1960 Kepolisian diberi status sebagai unsur ABRI, sedangkan DPR-GR mengesahkan U.U No. 13 Th. 1961 tentang peraturan-peraturan Pokok Kepolisian.

Dengan demikian Kepolisian merupakan alat pelindung Rakyat yang lebih dapat memenuhi keadaan dan panggilan masa.

PERIODE DEMOKRASI TERPIMPIN TAHUN 1959 - 1965

a. Peranan POLRI dalam TRIKORA.

Pada tanggal 19 Agustus 1961 telah dicanangkan TRI KOMANDO RAKYAT untuk memulihkan wilayah Indonesia, Irian Bagian Barat yang masih diduduki kekuatan Belanda. Dalam pelaksanaan TRI KORA, POLRI ikut serta membentuk :

- a. Kesatuan-kesatuan tugas tempur untuk merebut kembali Irian Bagian Barat, bersama-sama dengan Angkatan Bersenjata lainnya (AD, AL, dan AU).
- b. Menempatkan Perwira² Polisi didalam tubuh KOMANDO MANDALA yang berkedudukan di Makassar.

Seperti diketahui Irian Barat, sekarang Irian Jaya berhasil dimasukkan kedalam wilayah kekuasaan R.I pada tahun 1962.

- b. Dalam penumpasan G.30.S /PKI dalam tahun 1965, POLRI ikut serta dalam operasi gabungan ABRI antara lain dalam operasi TRISULA di Blitar maupun di daerah² lain diseluruh Indonesia.

Dalam periode tahun 1959 - 1963 sebagai Menteri/ Kepala Kepolisian Negara adalah Jenderal Polisi SOEKARNO DJOJONAGORO dan dalam periode tahun 1963-1965 sebagai Menteri/ Panglima Angkatan Kepolisian adalah Mayor Jenderal Polisi SOETJIPTO DANUKUSUMO.

PERIODE PEMBINAAN ORDE BARU TAHUN 1965

Integrasi ABRI bukanlah masalah yang baru, karena ABRI lahir secara terintegrasi dengan dasar dan tujuan serta sasaran perjuangan yang satu yaitu menghadapi musuh yang hendak merongrong kemerdekaan. Integrasi ABRI dalam orde lama terhambat karena adanya divergensi antara Angkatan yang kemudian dihilangkan, melalui:

- a. Pendekatan mental
- b. Pendekatan doktrin
- c. Pendekatan organisatoris

a. Pendekatan mental :

Dilahirkan dibidang pendidikan : salah satu contoh adanya AKABRI untuk ketiga Angkatan dan POLRI dalam satu atap/wadah, yang dibuka pada tanggal 24 Januari 1968 di Magelang, kemudian dilanjutkan di SESKO ABRI dan lain-2.

b. Pendekatan doktrin :

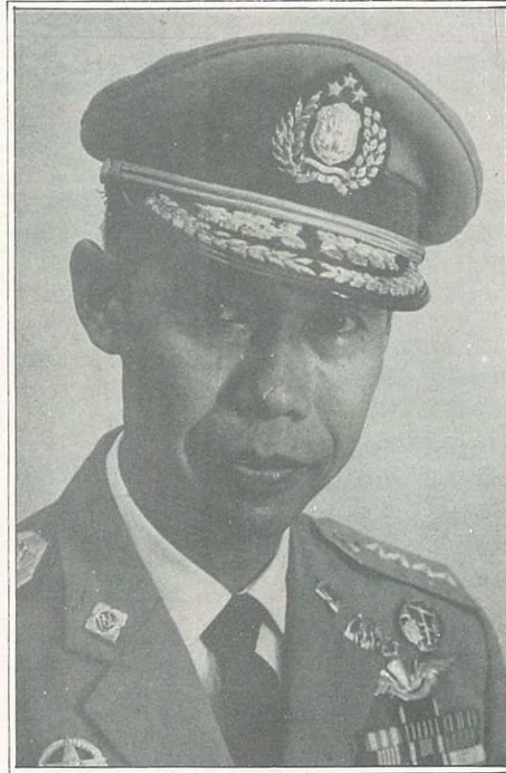
Dengan adanya doktrin Catur Darma Eka Karma 1966 yang berarti tugas pokok ABRI yang terdiri atas empat matra, yang merupakan satu perbuatan suci yang wajib diperjuangkan bersama untuk kepentingan rakyat, Bangsa dan Negara.

c. Pendekatan organisatoris :

Adanya keputusan Presiden No.132 / 1967 tentang pokok² organisasi dan prosedur Departemen Pertahanan dan Keamanan merupakan langkah pertama dalam usaha penyempurnaan struktur organisasi dari pada integrasi ABRI. Kemudian dikeluarkan keputusan Presiden No.79/1967 yang meru-



*Jenderal Polisi Soetjipto
Judodihardjo,
Menteri/Panglima Angkatan
Kepolisian
1965 - 1968*



*Jenderal Polisi Drs. Hugeng
Iman Santoso,
Kepala Kepolisian Republik
Indonesia
1968 - 1971*



*Jenderal Polisi Drs. Moh. Hassan,
Kepala Kepolisian Republik
Indonesia
1971 - 1974*

pakan penyempurnaan pokok2 organisasi dan prosedur Departemen HANKAM sebagai tercantum dalam Keputusan Presiden No.132/1967. Pemegang kekuasaan tertinggi adalah Presiden dan dibantu oleh MEN HANKAM/PANGAB.

Dalam periode tahun 1965 - 1968 sebagai MEN/PANGAK adalah Jenderal Polisi SOETJIPTO YUDODIHARDJO.

Dalam periode tahun 1968 - 1971 sebagai KAPOLRI adalah Jenderal Polisi Drs HUGENG IMAN SANTOSO.

Dalam periode tahun 1971 - 1974 sebagai KAPOLRI adalah Jenderal Polisi Drs Moh. HASSAN dan sejak tahun 1974 - sampai buku ini disusun KAPOLRI adalah Letnan Jenderal Polisi Drs WIDODO BUDIDARMO.

Demikian sekilas lintas sejarah Kepolisian R.I yang tak dapat dilepaskan dari pada sejarah dan perkembangan Negara R.I.



*Let. Jen. Pol. Drs. Widodo
Budidarmo,
Kepala Kepolisian Republik
Indonesia
1974*



Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, mengadakan Rapat Pimpinan tiap tahun. Para peserta ketika mengadakan kunjungan resmi kepada Presiden Soeharto bergambar bersama

Inset :
Kepala Kepolisian R.I. Letnan Jenderal Pol. Widodo Budidarmo berjabat tangan dengan Presiden Soeharto.

ORGANISASI 2





ORGANISASI

A. KEDUDUKAN

Kepolisian Negara Republik Indonesia disingkat POLRI adalah suatu bagian integral ABRI yang merupakan bagian Organik dari DEPHANKAM serta berkedudukan langsung dibawah MENHANKAM/PANGAB.

B. TUGAS POKOK

1. POLRI bertugas pokok melaksanakan dan mengamankan kebijaksanaan dibidang HANKAMNAS dengan menyelenggarakan :

a. Pembinaan POLRI, baik sebagai kekuatan HANKAM maupun sebagai kekuatan sosial, serta menyelenggarakan pembinaan tehnik Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat berdasarkan kebijaksanaan dan ketentuan MENHANKAM/PANGAB.

b. Segala usaha, kegiatan dan pekerjaan sebagai Alat Negara Penegak Hukum, terutama dibidang Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, berdasarkan kebijaksanaan dan ketentuan MENHANKAM/PANGAB dengan mengingat undang-undang Nomor 13 Tahun 1961 dan Keputusan Presiden R.I Nomor 52 Tahun 1969 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang menyangkut tugas Kepolisian.

2. Disamping tugas pokok, ayat 1 diatas, POLRI dapat diberi tugas-tugas lain yang berhubungan dengan pembinaan kekuatan dan kemampuan HANKAMNAS serta partisipasi dalam kekaryaan ABRI dan Operasi Bhakti, berdasarkan kebijaksanaan dan ketentuan MENHANKAM/PANGAB.

C. FUNGSI-FUNGSI

1. Fungsi Utama

- a. Kekuatan
- b. Administrasi
- c. Penggunaan kekuatan
- d. Pengembangan

2. Fungsi Organik

a. Fungsi Organik POLRI :

Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Menyelenggarakan segala usaha kegiatan dan pekerjaan berupa tindakan, gerakan dan atau aksi mengenai Pembinaan Masyarakat Kesamaptaan dan Penindakan Kepolisian baik dalam penyelenggaraan Kegiatan dan Operasi Kepolisian maupun Operasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

b. Fungsi Organik Militer

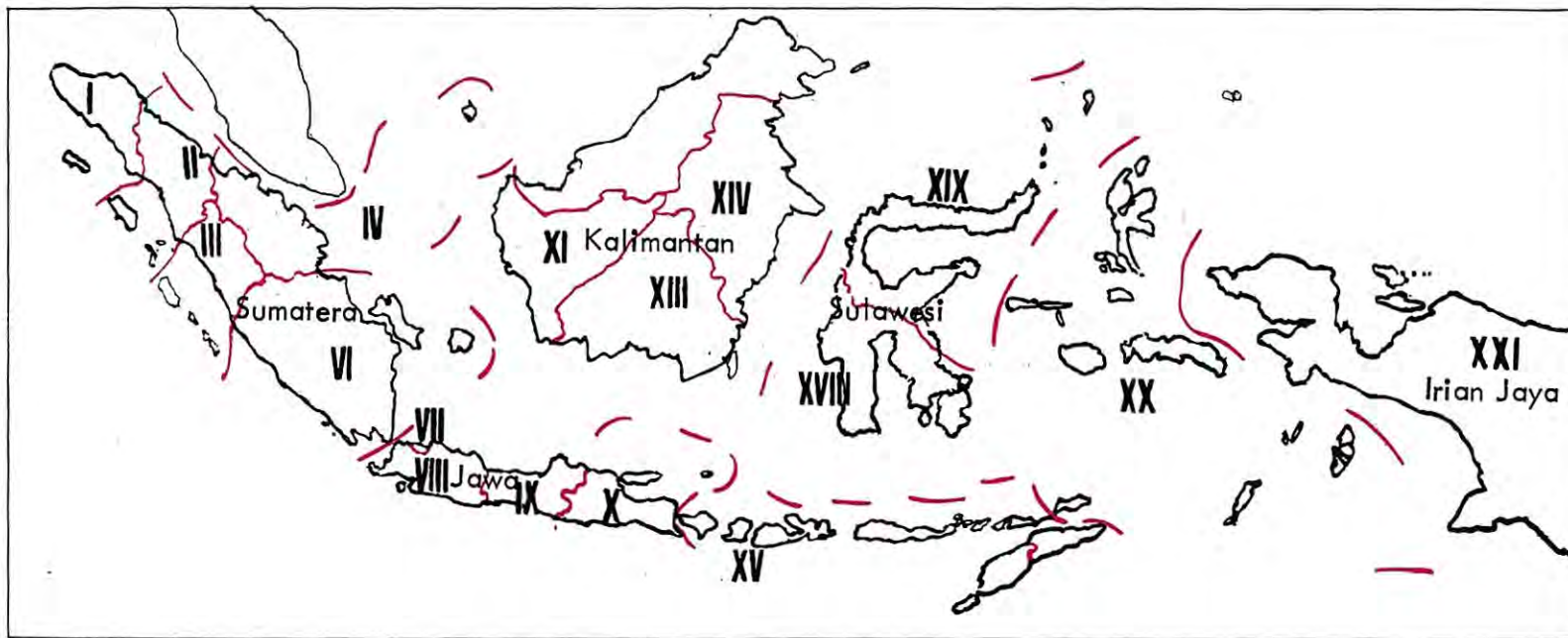
- Intelijen
- Personil
- Logistik
- Latihan

c. Fungsi Organik Pembinaan

- Perencanaan
- Pengorganisasian
- Pengendalian

3. Fungsi Tehnis

- a. Hukum
- b. Administrasi Personil
- c. Kesehatan Khusus Kepolisian
- d. Keuangan
- e. Komunikasi dan Elektronika
- f. Intelijen Kepolisian
- g. Sabhara Kepolisian
- h. Lalu-lintas Kepolisian
- i. Perairan dan Udara Kepolisian
- j. Reserse Kepolisian
- k. Pembinaan Masyarakat untuk tugas Kepolisian



- l. Brigade Mobil Kepolisian
- m. Kriminalistik
- n. Identifikasi
- o. Sejarah
- p. Psikologi
- q. Pembinaan Jasmani
- r. Sistem Informasi Pembinaan

4. Fungsi Khusus

- a. Provoost
- b. Nasihat Hukum
- c. Pembinaan Mental
- d. Operasi Bhakti
- e. Kekarya
- f. Pencarian dan Penyelamatan
- g. Penerangan

D. BENTUK ORGANISASI

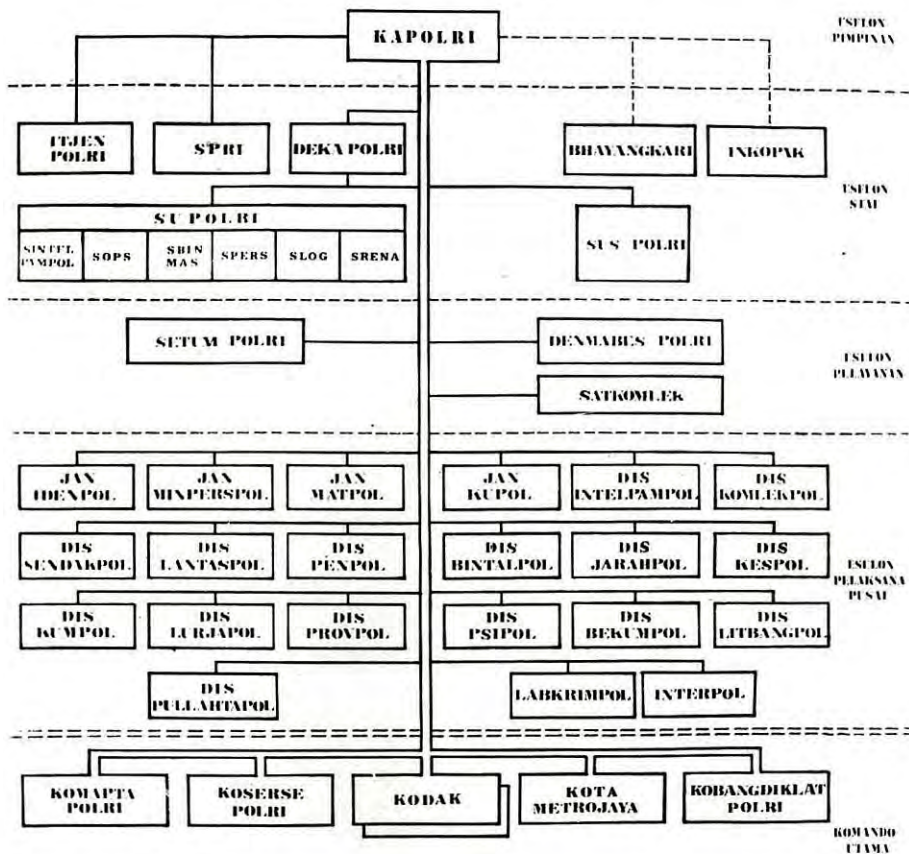
Bentuk Organisasi POLRI berazaskan Orga-

nisasi Garis dan Staf.

E. SUSUNAN ORGANISASI

1. Tingkat Markas Besar POLRI
 - a. Eselon Pimpinan: KAPOLRI
 - b. Eselon Staf / Pembantu Pimpinan
 - Deputy KAPOLRI
 - Staf Umum POLRI
 - Inspektorat Jenderal dan Perbendaharaan POLRI
 - Staf Khusus POLRI
 - Staf Pribadi
 - c. Eselon Pelayanan:
 - Sekertariat Umum POLRI
 - Detasemen Markas MABES POLRI
 - Satuan Komunikasi dan Elektronika

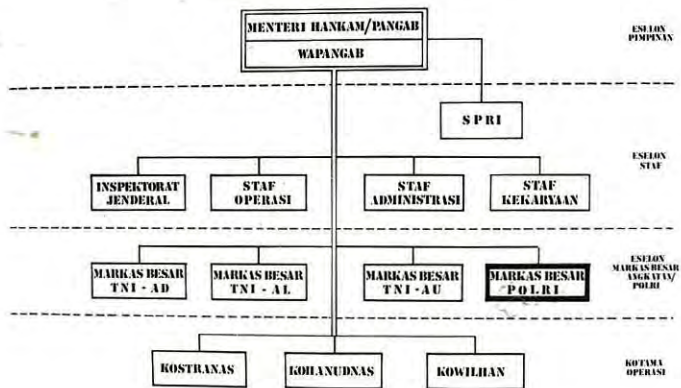
BAGAN ORGANISASI POLRI



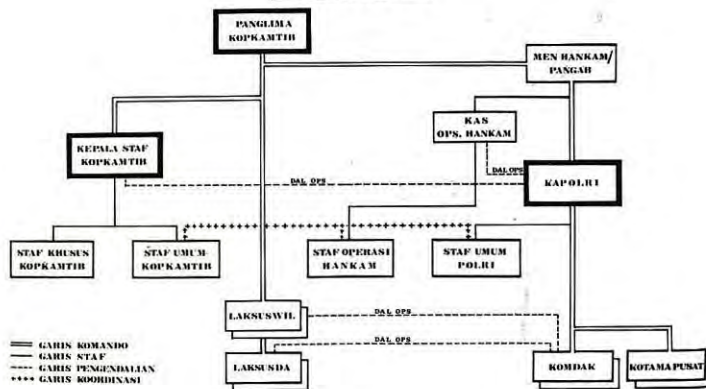
KETERANGAN:

-----: GARIS PEMBINAAN/
HIMPINGAN

BAGAN ORGANISASI DEPARTEMEN HANKAM



BAGAN HUBUNGAN FUNGSIONAL KOPKAMTIB-POLRI





Sebagai kelanjutan dari pada Rapat Pimpinan ABRI, setiap tahun POLRI mengadakan Rapat Pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Kepolisian R.I.



*Nampak Kepala Kepolisian R.I. Letnan Jenderal Polisi
Drs. Widodo Budidarmo sedang memimpin Rapat Pimpinan
POLRI, didampingi oleh Deputy KAPOLRI Letnan Jenderal
Pol. Drs. Siswadi MA.*

d. Eselon Pelaksanaan Pusat :

- Jawatan Identifikasi POLRI
- Jawatan Administrasi Personil POLRI
- Jawatan Materiil POLRI
- Jawatan Keuangan POLRI
- Dinas Intelijen dan Pengamanan POLRI
- Dinas Komunikasi dan Elektronika POLRI
- Dinas Senjata-api dan Bahan Peledak POLRI
- Dinas Lalu-lintas POLRI
- Dinas Penerangan POLRI
- Dinas Pembinaan Mental POLRI
- Dinas Sejarah POLRI
- Dinas Kesehatan POLRI
- Dinas Hukum POLRI
- Dinas Penyaluran dan Penyediaan Lapangan Kerja POLRI
- Dinas Provoost POLRI
- Dinas Psikologi POLRI
- Dinas Pembekalan Umum POLRI
- Dinas Penelitian dan Pengembangan POLRI
- Dinas Pengumpulan dan Pengolahan Data POLRI
- Laboratorium Kriminil POLRI
- Badan Kerja-sama Internasional Kepolisian (INTEPPOL)

ad.c. Komando2 Daerah Kepolisian (17)

- Komando2 Antar Resort Kepolisian (KOMTARES) dan Komando2 Kota Besar Kepolisian (KOMTABES)
- Komando2 Resort Kepolisian (KOMRES)
- Komando2 Sektor Kepolisian (KOMSEK)

ad.d. Komando Kepolisian Kota Metropolitan Jakarta Raya

- Komando2 Wilayah Kepolisian (KOMWILKO)
- Komando2 Sektor Kepolisian Kota (KOMSEKKO)
- Pos2 Kepolisian Kota

2. Tingkat Komando Utama

- a. Komando Samapta POLRI
- b. Komando Reserse POLRI
- c. Komando-komando Daerah Kepolisian
- d. Komando Kepolisian Kota Metropolitan Jakarta Raya
- e. Komando Pengembangan, Pendidikan dan Latihan POLRI

KESAMAPTAAN DAN PEMBINAAN MASYARAKAT

3



Patroli dengan kendaraan bermotor.

KESAMAPTAAN DAN PEMBINAAN MASYARAKAT

1. SAMAPTA BHAYANGKARA KEPOLISIAN, disingkat SABHARAPOL, merupakan fungsi teknis operasional Kepolisian yang bersifat preventif pasif, yang diselenggarakan dengan tujuan untuk mengusahakan pencegahan terhadap terjadinya kriminalitas atau ancaman/gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

Sasaran yang ingin dicapai adalah menghilangkan atau minimal mengurangi adanya faktor "kesempatan" kriminogenik dan "niat" kriminogenik, sehingga peristiwa pelanggaran serta tindak pidana maupun non-pidana tidak akan terjadi.

Penyelenggaraan fungsi Sabharapol meliputi teknik2 antara lain : patroli, penjagaan, pengawalan dan sebagainya, termasuk pengejaran, penangkapan dan pemeriksaan tingkat pertama ditempat kejadian perkara, dalam rangka penindakan Kepolisian secara terbatas.

Pada hakekatnya setiap anggota POLRI terutama yang berpakaian seragam adalah pengemban tugas Sabhara tersebut.

2. LALU - LINTAS KEPOLISIAN, disingkat LANTAS POL.

Sebagai fungsi teknis operasional Kepolisian, LANTAS POL diselenggarakan dengan tujuan untuk mengusahakan pencegahan, sekaligus penindakan secara penuh terhadap terjadinya kriminalitas/ancaman serta gangguan keamanan dan ketertiban lalu-lintas di jalan umum (Kamtiblantas).

Sasaran yang ingin dicapai adalah menghilangkan atau minimal mengurangi adanya faktor "kesempatan" dan "niat" untuk berbuat melanggar peraturan2 lalu-lintas, yang dapat mengakibatkan terjadinya kemacetan, gangguan ataupun kecelakaan lalu lintas.

Penyelenggaraan fungsi LANTAS POL meliputi teknik2 antara lain pengaturan, pengendalian, patroli, penjagaan, pengawalan dan lain sebagainya termasuk penindakan terhadap terjadinya setiap pelanggaran dan kecelakaan lalu-lintas. Karena ruang lingkupnya yang demikian itu, maka penyelenggaraan fungsi LANTAS POL disebut pula fungsi preventif pasif maupun aktif.

Pedoman tugas :

- Courtesy : sopan santun, sikap hormat dan mengerti perasaan orang lain.
- Service : selalu siap memberi pelayanan dan jasa2 untuk kepentingan umum.
- Protection: memberikan perlindungan dan keselamatan setiap orang dan benda yang berada di jalan umum.



Patroli berjalan kaki.



Patroli bersepeda.

Diruang operator, para petugas secara tekun tetap memelihara komunikasi dengan para petugas POLRI yang sedang berpatroli.



Polisi Lalu-Lintas mengadakan patroli Kota.





Satuan Polisi Lalu-Lintas Bersepeda motor siap melaksanakan tugas2 pengawalan, penertiban lalu-lintas, dan sebagainya. Dengan adanya hampir setengah juta kendaraan bermotor yang terdaftar di Jakarta, kemacetan dan gangguan lalu-lintas mudah terjadi.



Satuan Patroli Jalan Raya dengan mobil2 khusus yang dilengkapi dengan peralatan komunikasi motorola, memberikan jaminan adanya kecepatan dan mobilitas yang tinggi terutama bagi tugas2 penertiban lalu-lintas di-jalan2 raya.



Polisi mengadakan penjagaan 24 jam terus menerus di Kota Metropolitan Jakarta, yang berpenduduk hampir 5 juta orang.



Jembatan Semanggi yang cukup terkenal, membantu tertib dan lancarnya arus lalu-lintas di kota Metropolitan Jakarta.

3. PERAIRAN DAN UDARA KEPOLISIAN, disingkat AIRUD POL.

AIRUD POL merupakan fungsi teknis operasional Kepolisian, yang diselenggarakan dengan tujuan untuk mengusahakan pencegahan sekaligus penindakan terhadap terjadinya kriminalitas/ancaman serta gangguan terhadap keamanan dan ketertiban di wilayah laut/perairan Nasional (Lamtublaut/perairan).

Dalam hal ini termasuk pemberian bantuan pencarian dan pertolongan terhadap setiap peristiwa kecelakaan kapal laut maupun udara serta peristiwa lainnya dalam rangka SAR Nasional.

Karena ruang lingkungannya yang demikian itu, maka penyelenggaraan fungsi AIRUD POL disebut pula fungsi preventif pasif maupun aktif.

Dengan penyelenggaraan fungsi itu, sasaran yang ingin dicapai adalah menghilangkan atau minimal mengurangi adanya faktor "kesempatan" kriminogenik serta "niat" kriminogenik, dalam bentuk pelanggaran dan atau kejahatan/tindak pidana yang menyangkut laut/perairan.

Penyelenggaraan fungsi AIRUD POL meliputi teknik2 antara lain : patroli, pengawalan, pengejaran, penangkapan dan penyidikan

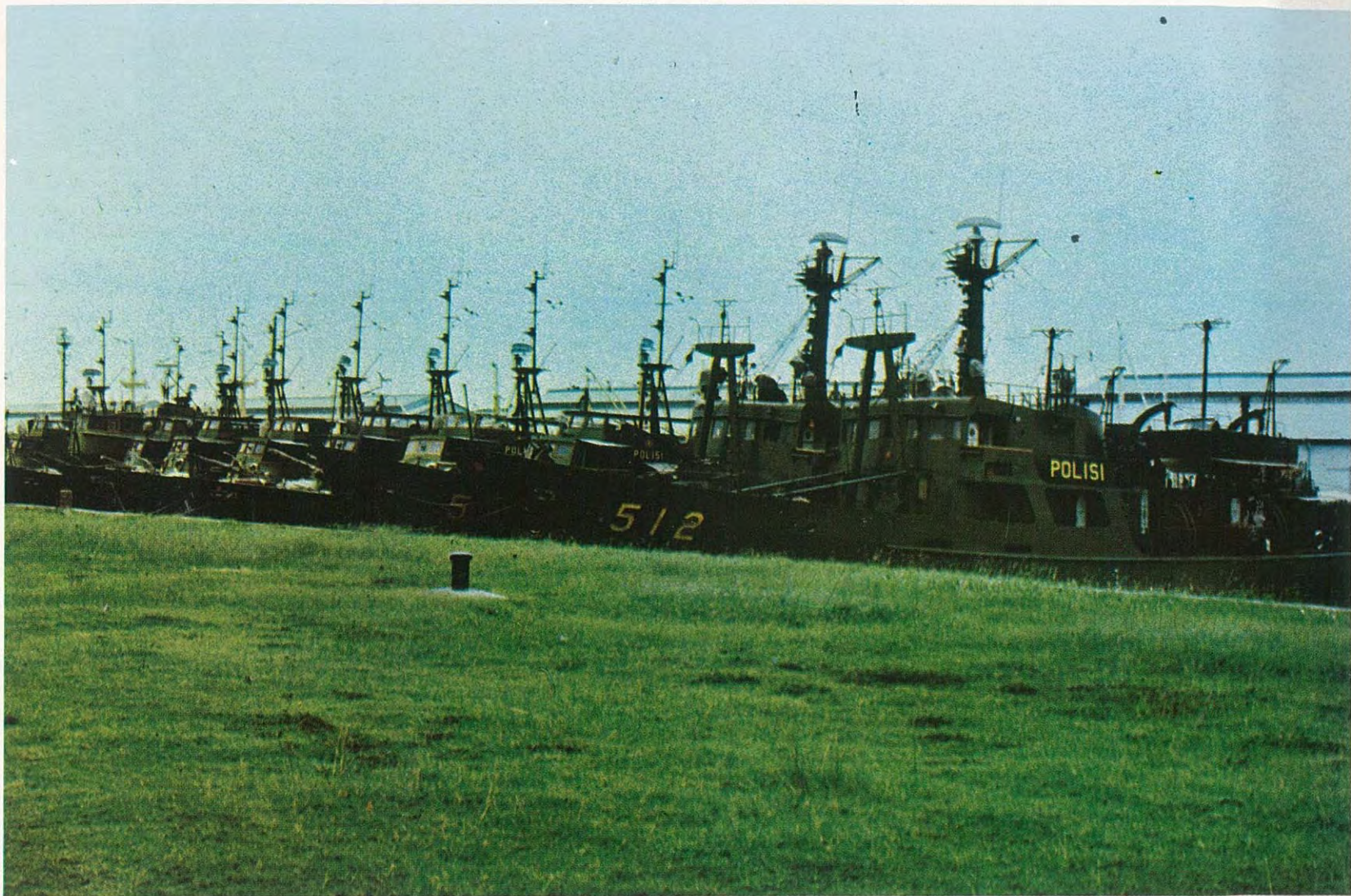
Disamping itu terdapat teknik2 lain dalam rangka usaha pencarian dan pertolongan (S.A.R. = Search and Rescue).

Dalam rangka bantuan operasional taktis terhadap fungsi2 teknis operasional lainnya, dalam penyelenggaraan fungsi AIRUD POL ini terdapat teknik2 dalam bentuk, antara lain :

- a. Bantuan Udara taktis dalam rangka pengaturan lalu-lintas dan Udara.
- b. Bantuan udara taktis dalam rangka pengejaran sampai dengan penangkapan peristiwa tindak pidana (misalnya banditisme, pencurian mobil dan lainnya) dalam rangka tindakan represif Kepolisian.
- c. Bantuan Angkutan Laut / Udara dalam rangka kegiatan logistik.

Dalam rangka tugas yang bersifat Nasional, khususnya dibidang pemberantasan/penanggulangan penyelundupan, penyelenggaraan fungsi AIRUD POL tergabung dalam tugas BAKORKAMLA (Badan Koordinasi Keamanan Laut - Satuan Badan yang dibentuk oleh Departemen HANKAM).

Motto perjuangan : " Nityacas Samapta " yang berarti unsur2 perairan POLRI dengan dibantu unsur2 udaranya selalu siap dan waspada menunaikan tugas kewajibannya.



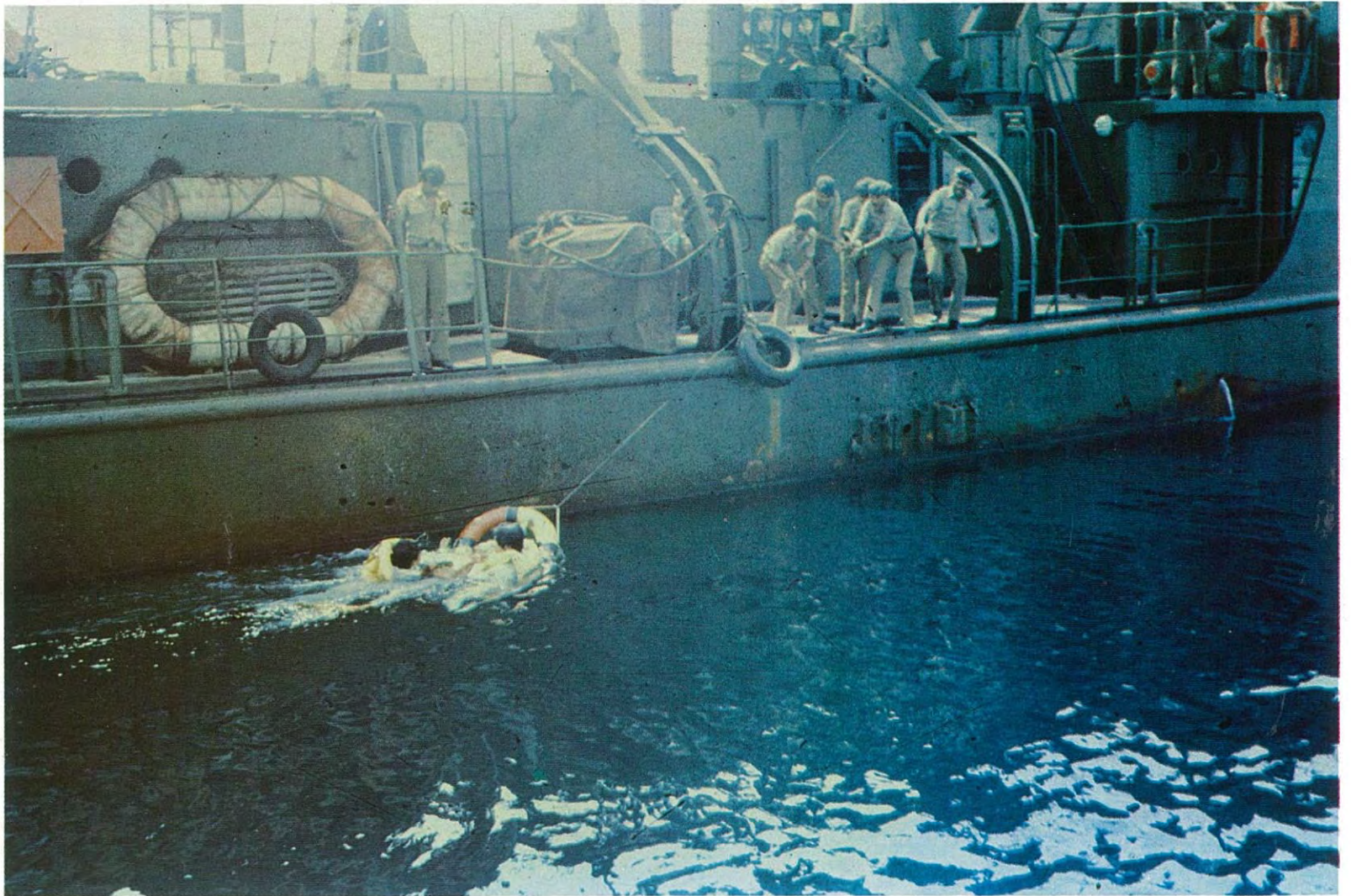
Kapal2 AIRUD sedang berlabuh dipangkalannya dekat Tanjung Priok.



Kapal AIRUD ini memiliki persenjataan yang cukup kuat untuk menjalankan tugas Patroli di wilayah laut/ Perairan Nasional, serta memiliki daya jelajah sampai ke Irian Jaya.



Sebuah speedboat AIRUD yang sedang bertugas didaerah perairan Tanjung Priok, satu pelabuhan yang mempunyai kegiatan dan taraf internasional.



Satuan SAR AIRUD tengah mengadakan latihan pertolongan di laut.



Pesawat Terbang AIRUD disamping tugasnya dibidang pengangkutan udara untuk tugas-2 Kepolisian, juga membantu tugas-2 SAR (Search and Rescue).



Satuan SAR AIRUD POLRI dengan orang-orang yang terlatih dan peralatan yang memadai, setiap saat siap diterjunkan dalam tugas.



4. PEMBINAAN MASYARAKAT KEPOLISIAN, disingkat BINMAS POL.

BINMAS POL merupakan fungsi teknis operasional Kepolisian yang bersifat preventif aktif, yang diselenggarakan dengan maksud untuk mengusahakan pencegahan terhadap terjadinya kriminalitas / ancaman serta gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) .

Dengan tehnik2 tertentu, antara lain penerangan, penyuluhan dan sebagainya, BINMAS POL ingin mencapai sasaran :

- a. Secara aktif merubah faktor2 " kesempatan " dan "niat" kriminogenen dalam masyarakat menjadi faktor2 yang berpengaruh positif dan konstruktif.



Atas :

Pramuka Bhayangkara merupakan salah satu wadah, dimana POLRI membimbing dan mengarahkan para remaja kepada kegiatan-2 yang positif dan berguna bagi masyarakat.

Bawah :

Penerangan dan pendekatan-2 secara langsung kepada masyarakat sangat penting, untuk menumbuhkan, memelihara serta mengembangkan partisipasi mereka pada tugas pembinaan Kamtibmas.

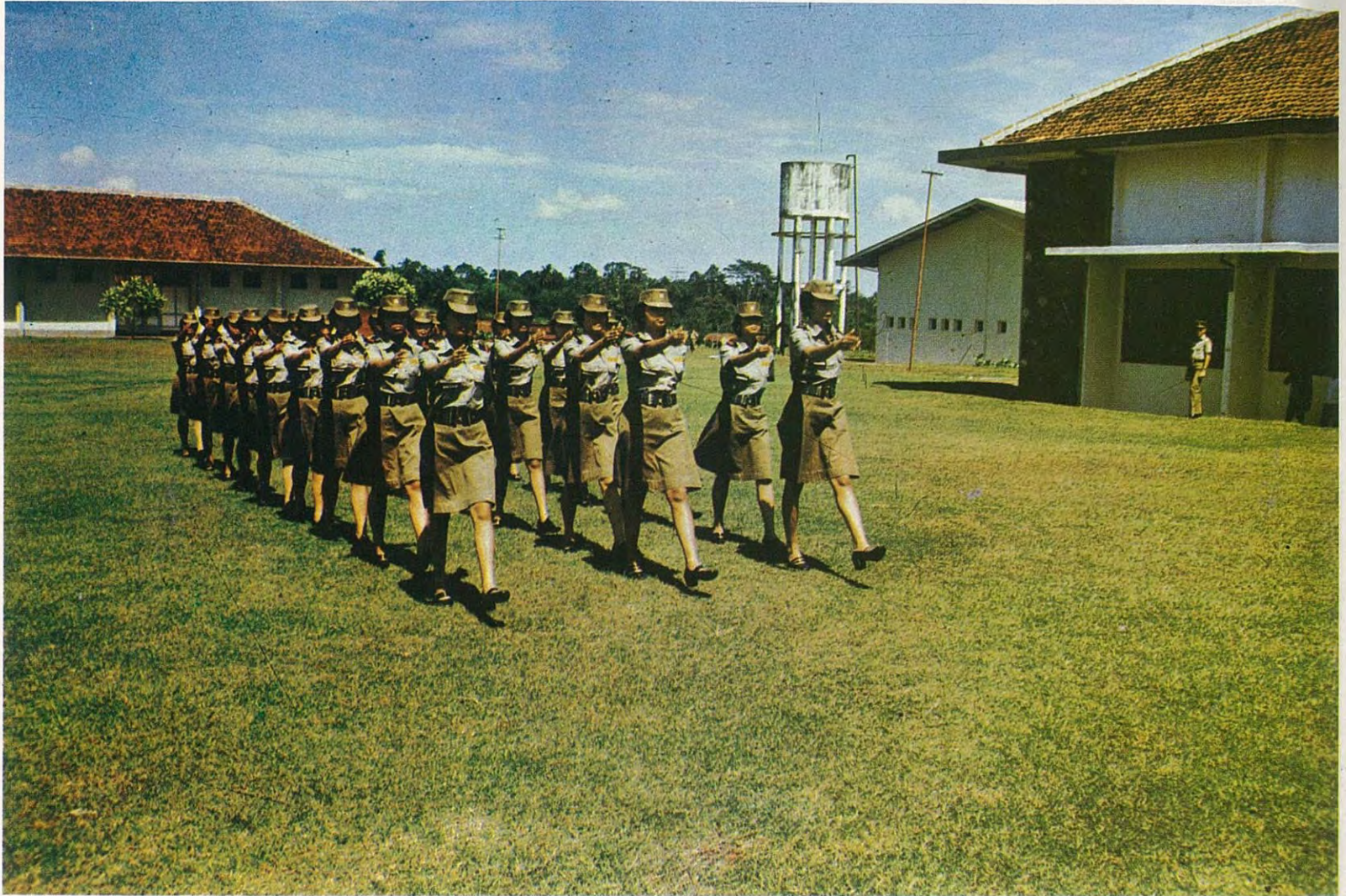




*Polisi Wanita sangat tepat untuk tugas-2
dibidang penanggulangan kenakalan anak.*



*Polisi Wanita tepat pula dibebani tugas
menangani pelanggaran hukum yang dilaku-
kan oleh wanita.*



Sebagai anggota ABRI dan POLRI pada khususnya, Polisi Wanita mempunyai tugas dan kewajiban yang sama dengan Polisi pada umumnya, untuk mana kepada mereka diberikan pendidikan dan pengetahuan yang diperlukan.



Dalam usaha merehabilitasi anak-2 nakal, kepada mereka diberikan pelajaran-2 agar dikemudian hari dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna.



Kegiatan-2 dalam rangka merehabilitasi para pelanggar hukum wanita diarahkan untuk memudahkan penyesuaian diri dengan norma-2 kemasyarakatan.

- b. Secara aktif menjadi penggerak, pendorong dan tauladan kearah perbuatan yang positif/ konstruktif dalam masyarakat, sesuai azas2 kepemimpinan dan komunikasi ABRI.
- c. Secara aktif menumbuhkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Binkamtibmas).

Fungsi Binmas Pol diterapkan dan dikembangkan sesuai kebutuhan dan perkembangan pelaksanaan tugas operasional POLRI serta pola kriminalitas/ ancaman/ gangguan yang terjadi.

Disamping itu disesuaikan pula dengan pola yang menyangkut faktor pelaku, motif, modus operandi dan sebagainya.

Dengan adanya pengetrapan dan pengembangan diatas sesuai dengan sasaran pembinaannya, maka dalam penyelenggaraan Binmas Pol, kita menjumpai adanya kejuruan/ keahlian teknis Birmas Pol, antara lain: Pembinaan golongan anak2 Pemuda/ Mahasiswa dan Pembinaan golongan Penderita-pecandu Narkotika.

5. BRIGADE MOBIL KEPOLISIAN, disingkat BRIMOB POL.

Brimob Pol merupakan fungsi teknis bantuan operasional taktis, yang diselenggarakan dengan tujuan untuk membantu pelaksanaan fungsi2 teknis operasional Kepolisian lainnya, baik dalam penyelenggaraan fungsi Kesamaptaan dan Pembinaan Masyarakat (Patrol and Crime Prevention) maupun dalam fungsi penindakan (Crime Investigation).

Bantuan taktis Brimob Pol ini adalah dalam rangka penyelenggaraan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Binkamtibmas) serta operasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Ops Kamtibmas).

Disamping itu juga berfungsi sebagai bantuan taktis tempur, baik dalam rangka penyelenggaraan operasi Keamanan Dalam Negeri (Ops Kamdagri) maupun operasi2 Pertahanan (Opshan) sesuai kebutuhan.

Dengan fungsi Brimob Pol yang meliputi fungsi2 preventif pasif maupun/ aktif serta represif tersebut, maka dibutuhkan adanya persyaratan kemampuan profesional multi-guna yang berkwalitas tinggi dengan disertai kemampuan mobilitas yang tinggi pula.

Dengan demikian Brimob Pol pada setiap saat akan mampu dihadapkan kepada segala bentuk ancaman, gangguan dan hambatan, baik dalam rangka Binkamtibmas, Opskamtibmas/ Opskamdagri, ataupun dalam rangka penyelenggaraan pola2 operasi Pertahanan sesuai kebutuhan.

Motto perjoangan : "Tetap jaya dan suci dalam pengabdianya di daerah aman maupun tidak aman, menunaikan tugas kewajibannya berdasarkan Panca Sila dengan memegang teguh Catur Prasetya."

Para Anggota Brigade Mobil Polri menginsyafi sepenuhnya arti mobilitas dalam tugas pekerjaannya.



Untuk tugasnya sebagai satuan yang multi guna di lingkungan POLRI, mereka mendapat latihan yang cukup berat.





Brigade Mobil Polri yang dilatih agar bisa bergerak cepat, merupakan satuan yang mampu untuk setiap saat dihadapkan kepada segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap Kamtibmas.



Latihan terjun dari udara, merupakan kegiatan yang penting bagi Brigade Mobil POLRI, dalam rangka membina keterampilan dan kecepatan bergerak.

POLRI dewasa ini memiliki satuan yang mahir dalam menindak dan mengendalikan huru hara. Untuk itu tersedia persyaratan mobilitas yang diperlukan.



Pengetahuan psikologi massa diperlukan untuk dapat menguasai massa dan mengambil tindakan jika terjadi huru hara.



Satuan Dakhura memiliki peralatan yang diperlukan seperti masker, perisai dan tongkat.





| Siasat dan cara menindak dan mengendalikan huru hara dan demonstrasi dipelajari dengan seksama.

BRIGADE SATWA POLRI :

Salah satu senjata bantuan operasional taktis POLRI yang kini makin tampak kegunaannya dan mempunyai prospek baik, adalah Brigade Satwa, yang mempunyai kemampuan untuk membantu tugas2 POLRI baik preventif maupun represif.

Ia merupakan Kesatuan Khusus, yang melalui manusia2 ahlinya menggunakan potensi ketrampilan dan naluri alam hewan2 tertentu (kuda, anjing, dan lain2), dalam melaksanakan tugas2 pokok Kepolisian.

Anjing2 yang mempunyai daya cium ± 300 kali lebih tajam dari pada manusia2 untuk dapat mengetahui tiap perubahan molekul yang ada disekitarnya, dalam keadaan terlatih, akan merupakan alat2 yang efektif untuk menangkap penjahat dalam perkara2 kriminal, bahkan juga dapat membinasakan musuh dalam perang.

Sedang satuan Kuda antara lain dibebani tugas2 pengawalan, serta pengendalian dan penindakan huru-hara.



Brigade Satwa POLRI memiliki kuda-2 yang dapat digunakan dalam tugas pengendalian massa atau pengawalan kehormatan.



Dengan daya ciumnya yang istimewa serta keberaniannya, maka anjing sangat membantu dalam tugas penyidikan/pelacakan penjahat.

A. PENINDAKAN KEPOLISIAN
B. INTELIJEN KEPOLISIAN

4

A. PENINDAKAN KEPOLISIAN

1. RESERSE KEPOLISIAN, disingkat RESERSEPOL.

Yaitu fungsi teknis operasional Kepolisian yang diselenggarakan melalui teknik-teknik tertentu untuk mengusahakan penindakan yang cepat, tepat dan cermat terhadap segenap peristiwa pidana baik yang bermotif kriminal biasa maupun yang bermotif/berlatar belakang subversi dalam rangka BINKAMTIBMAS maupun dalam rangka OPS KAMTIBMAS/KAMDAGRI, dengan sasaran menghilangkan/minimal mengurangi terjadinya/timbulnya kriminalitas ataupun ancaman serta gangguan KAMTIBMAS lainnya, dengan prinsip represif untuk memperoleh efek preventif.

Teknik-teknik dalam penyelenggaraan fungsi RESERSEPOL tersebut adalah meliputi usaha atau pekerjaan antara lain Pengejaran, Penangkapan, Pemeriksaan, Penyidikan beserta pengungkapan latar belakang segenap peristiwa / perkara pidana yang terjadi sampai dengan pengajuan perkara yang bersangkutan kepada Penuntut Umum untuk sidang Pengadilan.

Penyelenggaraan fungsi RESERSEPOL termaksud dapat disebut pula fungsi represif.

Fungsi RESERSEPOL diterapkan dan dikembangkan dalam pelaksanaan tugas operasional Kepolisian sesuai perkembangan pola-pola ancaman/ gangguan kriminalitas yang terjadi, termasuk faktor Pelaku, Tempat, Waktu/Instrumen, Motif dan Modus Operandi; sehingga dari pengetrapan dan pengembangan termaksud diatas maka sesuai macam dan bentuk peristiwa/perkara yang terjadi, dihasilkan berbagai kejuruan / keahlian dalam fungsi RESERSEPOL antara lain :

- a. RESERSE KRIMINIL
- b. RESERSE EKONOMI
- c. RESERSE NARKOTIKA
- d. Dan lain-lain sesuai kebutuhan.

Dalam pengembangan kejuruan/keahlian termaksud, masih dimungkinkan untuk berkembang lebih lanjut dalam bentuk kejuruan/keahlian yang lebih "specialized" sesuai kebutuhan antara lain Kejuruan/Keahlian bidang pembunuhan (Homicide), Pemalsuan (Forgery) dan lain sebagainya.

2. Dalam penyelenggaraan fungsi RESERSEPOL yang lebih cepat, tepat dan cermat, sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, maka timbul fungsi-fungsi teknis bantuan operasional yang bersifat teknis/teknologis/ilmiah, antara lain sebagai berikut:

a. Fungsi teknis IDENTIFIKASI KEPOLISIAN, disingkat IDENPOL, yaitu fungsi teknis dan bantuan operasional kepolisian yang menyelenggarakan pengenalan kembali ciri-ciri seseorang atau pelaku tindak pidana melalui :

- 1) Identifikasi.
- 2) Daktiloskopi.
- 3) Fotografi
- 4) Dan cara-cara lain sesuai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

b. Fungsi teknis LABORATORIUM KRIMINIL KEPOLISIAN, disingkat LABKRIMPOL, yaitu fungsi teknis bantuan operasional Kepolisian yang menyelenggarakan/melaksanakan segala usaha, kegiatan dan pekerjaan pemberian bantuan pembuktian secara laboratoris, dengan menggunakan teknologi dan ilmu pengetahuan :

- 1) KEDOKTERAN KEHAKIMAN
- 2) TOXICOLOGI / ILMU KIMIA RACUN



Mobil Unit Crime Squad dengan perlengkapan-2 untuk penyidikan kejahatan.



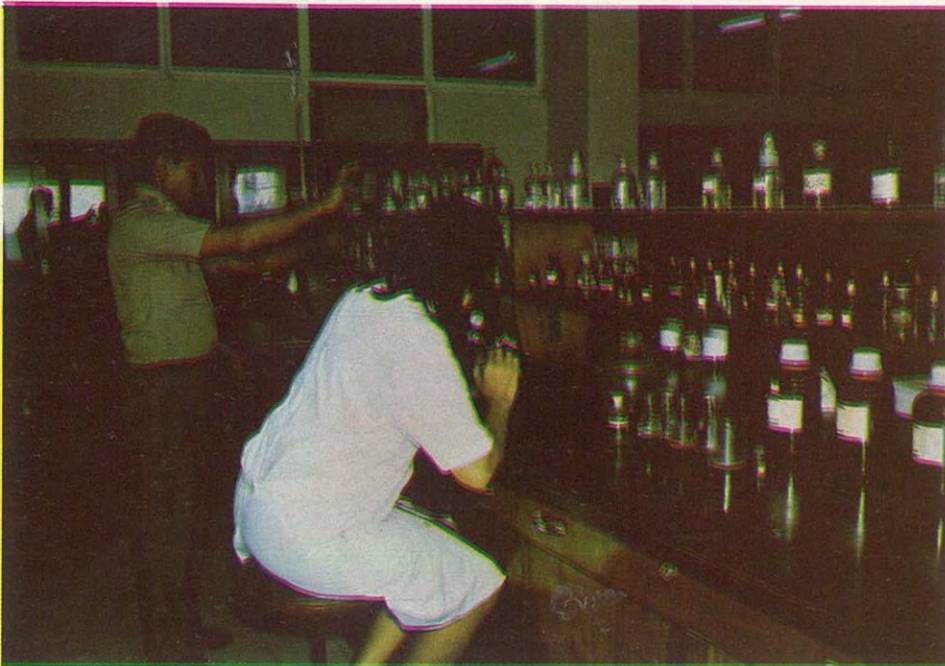
Untuk penyidikan kejahatan kini digunakan cara-2 dan alat-2 yang modern sebagai hasil kemajuan tehnis.

Cara memeriksa sidik jari lazim digunakan dalam penyidikan kejahatan.





" Lie detector ", merupakan salah satu alat yang dewasa ini dimiliki oleh Laboratorium Kriminil POLRI, yang akan bisa menentukan apakah seseorang tertuduh berjusta atau tidak.



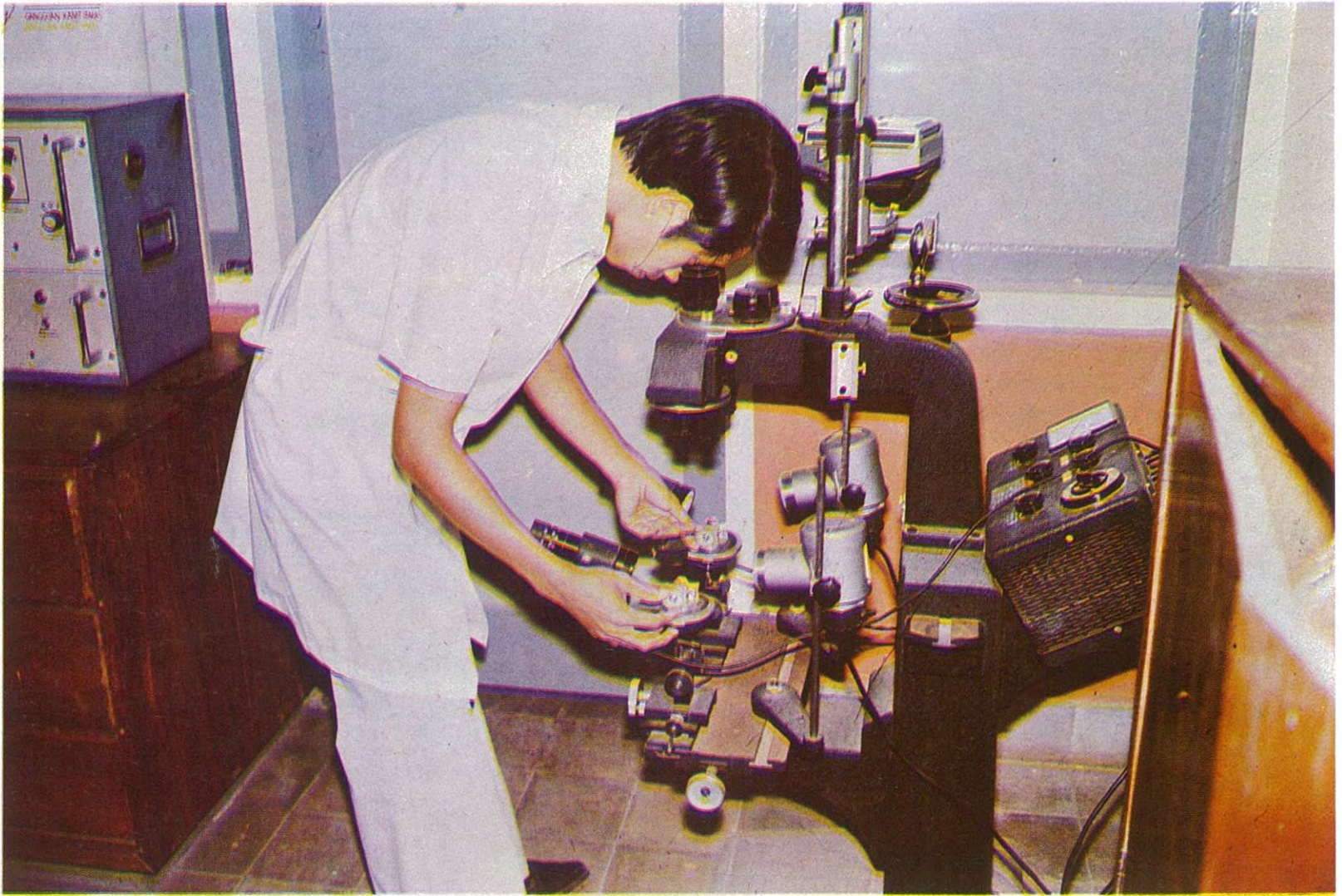
Dengan pemeriksaan kimiawi, Laboratorium Kriminil POLRI membantu dalam mengungkap perkara-2 kriminal.

Jejak kaki dipelajari juga dalam penyidikan kejahatan.



Sebuah alat untuk menyelidiki suatu dokumen.





Nampak kegiatan pemeriksaan balistik dalam Laboratorium Kriminal POLRI.



Kerja sama internasional diakui penting dan manfaatnya oleh Kepolisian sedunia seperti nyata dalam INTERPOL. Nampak delegasi Indonesia dipimpin oleh Kepala Kepolisian R.I. Jenderal Polisi Drs. Moh. Hassan dalam satu pertemuan/Sidang INTERPOL.



INTERPOL mengadakan pertemuan-2 tertentu untuk mengembangkan kerja sama. Disini delegasi Indonesia dipimpin oleh Kepala Kepolisian R.I. Letjen. Pol. Drs. WIDODO BUDIDARMO.

Pertukaran tanda mata dalam kunjungan Kepala Kepolisian R.I. Let. Jen. Pol. Drs. Widodo Budidarmo ke Singapura baru-2 ini dengan Kepala Kepolisian Tan Teck Khim.



Perdana Menteri Malaysia Datuk Husein Onn mengamugerahkan Bintang Panglima Setia Mahkota kepada Let. Jen. Pol. Drs. Widodo Budidarmo.



- 3) KRIMINALISTIK
 - 4) Lain-lain cara sesuai perkembangan teknologi dan Ilmu Pengetahuan.
- c. Fungsi Teknis PSIKOLOGI KEPOLISIAN disingkat PSIPOL, yaitu fungsi teknis bantuan operasional kepolisian yang menyelenggarakan bantuan dibidang analisa dan pertimbangan psikologi dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas operasional Kepolisian baik preventif maupun represif.

- d. Fungsi teknis HUKUM KEPOLISIAN, disingkat KUMPOL, yaitu fungsi teknis bantuan operasional kepolisian yang menyelenggarakan bantuan dibidang peraturan hukum dan perundang-undangan dalam rangka peningkatan kerjasama antara Alat Negara Penegak Hukum, baik dalam rangka pencegahan maupun dalam rangka penindakan atas terjadinya segenap pelanggaran / tindak pidana sampai dengan pengajuan kesidang pengadilan.

Disamping untuk menunjang pelaksanaan tugas operasional Kepolisian, maka fungsi teknis Hukum dapat berperan dalam menunjang pambangunan Hukum Nasional.

e. INTERPOL

Adalah fungsi kerjasama internasional Kepolisian, yang menyelenggarakan tugas-kewajiban sebagai " National Central Bureau (NCB)" dan " Service Correspondent" , termasuk pembinaan saluran komunikasi INTERPOL, untuk mewakili Pemerintah R.I. dalam hubungannya dengan "International Criminal Police Organization" , sesuai penugasan mewakili Pemerintah R.I. dalam kegiatan/ usaha pencegahan dan pemberantasan

kejahatan internasional serta memelihara hubungan koordinatif-fungsional dengan instansi-instansi/pihak-pihak lain sesuai kebutuhan.

B. INTELIJEN KEPOLISIAN

1. INTELIJEN KEPOLISIAN

Intelijen Kepolisian, disingkat INTELPOL, adalah bagian integral dari fungsi organik POLRI yang menyelenggarakan kegiatan intelijen meliputi antara lain "Early Detecting" dan " Early Warning " dalam rangka kegiatan/Operasi Kepolisian maupun Operasi KAMTIBMAS. Tehnik-tehnik dalam penyelenggaraan fungsi INTELPOL tersebut meliputi segala usaha, kegiatan dan pekerjaan antara lain Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan dalam rangka pelaksanaan tugas operasional Kepolisian baik yang bersifat preventif maupun represif, termasuk pelaksanaan tugas2 operasional HANKAM yang dibebankan kepada POLRI.

2. PENGAMANAN KEPOLISIAN

Pengamanan Kepolisian, disingkat PAMPOL, adalah bagian integral dari fungsi INTELPOL yang menyelenggarakan Kegiatan Pengamanan terhadap Komando, Kesatuan, Personil, Materiil, Pemberitaan dan kegiatan2 POLRI lainnya.

Tehnik-tehnik dalam penyelenggaraan fungsi PAMPOL tersebut meliputi segala usaha, kegiatan dan pekerjaan meliputi tehnik-tehnik pengamanan dalam rangka fungsi2 intelijen lainnya.

PENDIDIKAN DAN LATIHAN 5



Para Taruna AKABRI Bag. Kepolisian mendapat pelajaran akademis selama 4 tahun yang menjadi dasar bagi pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk menjadi pemimpin dalam Kepolisian R.I.

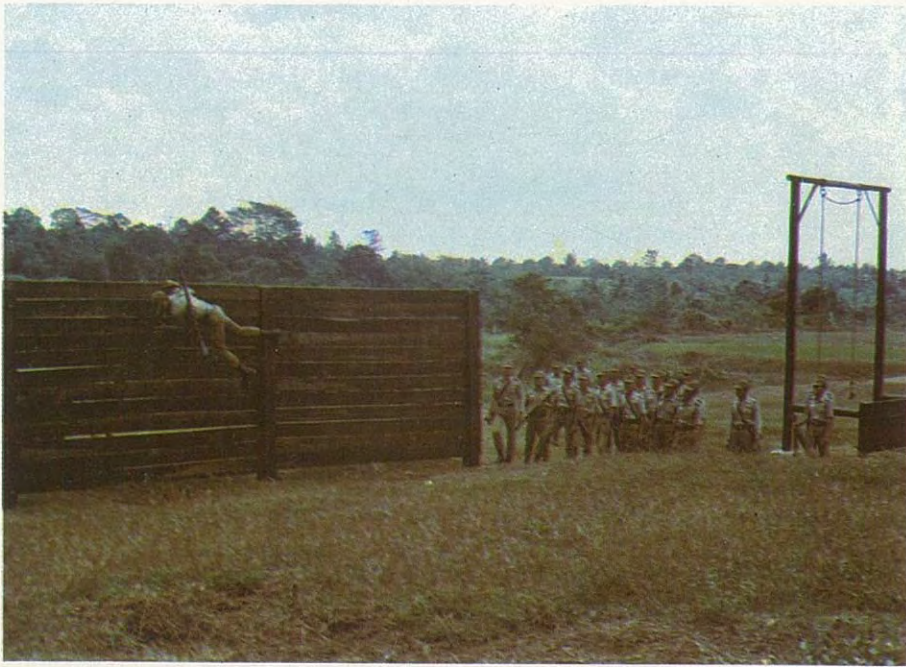
PENDIDIKAN DAN LATIHAN

Sistim pendidikan dan latihandilingkungan Polri tidak terlepas dari pada sistim pendidikan HANKAMNAS umumnya dan pendidikan ABRI pada khususnya, yang bertujuan untuk membentuk dan mengembangkan Perajurit ABRI yang ber-Sapta Marga dan ber-Sumpah Perajurit, bemental tinggi, cerdas dan tangkas.

Dalam lingkungan POLRI terdapat beberapa jenis pendidikan :

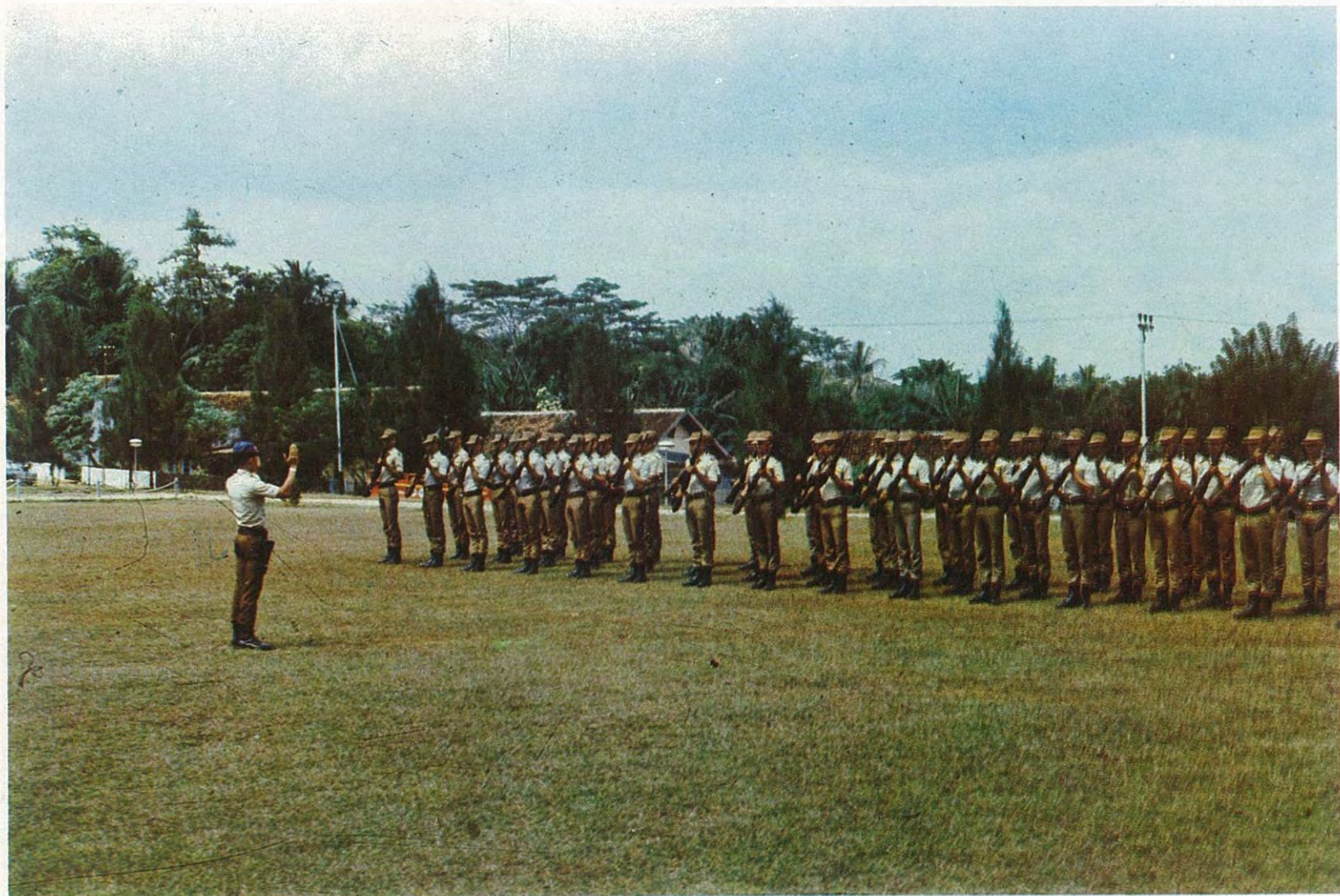
I. PENDIDIKAN PEMBENTUKAN, merupakan pendidikan formil untuk membentuk pengembangan seseorang sesuai dengan peranan dan status golongan pangkat yang bersangkutan:

1. Sekolah Calon Tamtama (SECATAM), dimaksudkan untuk mendidik Warga Negara Indonesia menjadi Tamtama POLRI. Calon diterima dari umum dengan pendidikan serendah-rendahnya Sekolah Dasar, tetapi dalam kenyataan para calon ternyata kebanyakan lulusan SLTP dan SLTA.
2. Sekolah Calon Bintara (SECABA), yang memberikan pendidikan untuk membentuk nilai kebintaraan kepada Tamtama terpilih, dan merupakan satu2nya lembaga yang memungkinkan kenaikan pangkat biasa dari Tamtama menjadi Bintara. Untuk memenuhi Secaba, seorang Tamtama dikenakan beberapa persyaratan, antara lain mempunyai sikap dan prestasi yang baik, telah berdinis se-kurang2nya 3 tahun sebagai Tamtama, mempunyai ijazah SLTP.
3. Sekolah Calon Perwira (SECAPA), dimaksudkan untuk memberikan pendidikan yang bertujuan membentuk nilai2 keperwiraan kepada Bintara terpilih. Sekolah ini diadakan untuk memenuhi



Salah satu bentuk latihan lapangan yang dilakukan di suatu Depo Pendidikan dan Latihan POLRI, tempat dimana dididik calon-2 Tamtama dan Bintara POLRI.





Latihan-2 yang teratur diperlukan untuk memelihara kondisi dan ketahanan.



Para Taruna mengikuti pelajaran dalam ruangan kelas.



Para Taruna mendapat juga pelajaran dalam laboratorium yang merupakan salah satu bagian dari pendidikan mereka.



Kemampuan jasmani dikembangkan juga dengan mempelajari judo.

kebutuhan akan Perwira Pertama diluar yang dibentuk melalui AKABRI.

Untuk memasuki Secapa, seorang Bintara harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain : mempunyai sikap dan prestasi yang baik, telah berdinastis 3 tahun sebagai Bintara, serendah-rendahnya lulusan SLTA. Lulusan Secapa diangkat sebagai Capa (Calon Perwira), dan setelah 1 - 2 tahun apabila menunjukkan prestasi yang baik dalam tugasnya diangkat sebagai Perwira Pertama (Letnan Dua Polisi).

4. AKABRI Bagian Kepolisian

AKABRI Bagian Kepolisian adalah pendidikan pada tingkat Departemen HANKAM yang membentuk Perwira 2 Jabatan/Kader Pimpinan ABRI/POLRI. Ini merupakan Komando Pelaksana Utama AKABRI pada masa integrasi personil tahap kedua, yang berada dibawah pimpinan Komandan Jenderal AKABRI, dan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pendidikan dan latihan menurut kurikulum khas POLRI. AKABRI Bagian Kepolisian berlangsung selama 4 tahun dan merupakan suatu pendidikan Akademis yang bertujuan memberikan dasar2 keperwiraan dan ilmu pengetahuan yang diperlukan bagi pembentukan kepemimpinan dalam organisasi ABRI/POLRI.

Untuk memasuki AKABRI seseorang harus lulusan SLTA, disamping harus dipenuhi syarat2 jasmaniah, rohaniah dan sikap kepribadian yang cukup stabil. Calon diambil dari umum dan dari lingkungan POLRI sendiri yang memenuhi syarat.

Lulusan AKABRI diangkat dalam pangkat Letnan Dua Polisi.

II. PENDIDIKAN PENGEMBANGAN UMUM, merupakan pendidikan formil untuk mengembangkan kemampuan umum yang diperoleh dari siklus pendidikan-latihan-penugasan sebelumnya, dalam rangka proyeksi penggunaan personil selanjutnya dan hanya diperuntukkan bagi personil Perwira.

1. Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK):

PTIK adalah Lembaga Pendidikan Tinggi Kepolisian, merupakan pendidikan lanjutan setelah AKABRI, yang menyelenggarakan pendidikan universitas dimana para lulusan AKABRI Bagian Kepolisian secara selektif dimungkinkan mendapatkan gelar kesarjanaan setelah menjalani praktek minimal 2 tahun serta menunjukkan konduite yang baik. Pendidikan di PTIK berlangsung selama 2 tahun. Motto perjuangan : " Bhakti - Dharma - Waspada ", yang berarti : Berdasarkan Bhakti yang tulus ikhlas kepada Bangsa Indonesia, menunaikan dharma tugas dan kewajiban menjunjung tinggi hukum nasional, dengan penuh kewaspadaan membentuk pribadi POLRI yang menjadi hati nurani rakyat.

2. Sekolah Staf dan Komando ABRI Bagian Kepolisian :

Sesko ABRI Bagian Kepolisian Menyiapkan dan mendidik Perwira Perwira pilihan agar memiliki kemampuan membina, mempertahankan dan mengembangkan mutu POLRI.

Disamping itu pendidikan dimaksud pula agar para Perwira mempunyai kemampuan untuk menduduki semua jabatan teras yang harus dijabat, serta kemampuan menjalankan Komando terhadap semua Kesatuan.



Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian merupakan pendidikan lanjutan bagi lulusan AKABRI Bag. Kepolisian yang telah menjalankan praktek minimal 2 tahun dengan konduite yang baik.



Upacara penyerahan ijazah kepada lulusan PTIK.

Peserta pendidikan diambil dari Perwira Menengah berpangkat Letnan Kolonel Polisi serta Mayor Polisi lulusan PTIK Doktorat dan Sekopol, dengan masing2 telah mencapai masa kerja paling sedikit 13 tahun sebagai anggota POLRI.

Motto perjuangan : "Sanyata Sumanasa Wira " , yang berarti kebenaran adalah tujuan jiwa pengabdian Perwira POLRI.

Sesko ABRI Bagian Kepolisian merupakan bagian yang integral dari pada SESKO ABRI.

III. PENDIDIKAN PENGEMBANGAN SPESIALISASI, merupakan pendidikan formal untuk mengembangkan kemampuan spesialisasi yang diperoleh dari siklus pendidikan-latihan - penugasan sebelumnya, dalam rangka proyeksi penggunaan personil selanjutnya :

1. Pendidikan kejuruan, yang ditujukan untuk memperdalam penguasaan suatu bidang pekerjaan tertentu, baik bagi Perwira, Bintara maupun Tamtama. Pendidikan kejuruan yang telah diadakan dilingkungan POLRI misalnya:

Perwira : - Pendidikan Kamra
- Pendidikan Samapta
- Pendidikan Reserse Narkotika
- Pendidikan Bah. Inggris
- Pendidikan Lalu -Lintas

Bintara : - Pendidikan Resmob
- Pendidikan Penyidik Perkara
- Pendidikan Bela Diri
- Pendidikan Pembukuan

- Pendidikan Keuangan
- Pendidikan Provoost
- Pendidikan Instruktur
- Pendidikan Lalu Lintas

Tamtama : - Pendidikan Musik
- Pendidikan Aswasada
- Pendidikan Perhubungan
- Pendidikan Lalu Lintas

2. Pendidikan Jabatan, yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dalam jabatan tertentu.

a. Sekolah Komando Kepolisian (SEKO-POL), mempunyai tugas untuk membentuk Perwira2 POLRI yang mempunyai kecakapan, kemampuan serta ketrampilan didalam memimpin dan membina eselon organisasi yang setingkat dengan Komando Resort Kepolisian.

Scope dari pada pendidikan Sekopol difokuskan/diarahkan pada pengembangan faktor2 mental - Psychologis serta penguasaan tehnik dan taktis melaksanakan tugas dalam jabatan.

Peserta pendidikan terdiri dari Perwira berpangkat Mayor Polisi yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

b. Pendidikan Perwira Bendaharawan Materiil, yang dimaksudkan untuk membentuk personil POLRI khususnya Bendaharawan Materiil POLRI, cukup memiliki pengertian, tanggung jawab dan kesadaran akan ketertiban administrasi, khususnya dalam bidang logistik.

Peserta pendidikan diambil dari Perwira Menengah berpangkat Letnan Kolonel Polisi serta Mayor Polisi lulusan PTIK Doktoral dan Sekopol, dengan masing2 telah mencapai masa kerja paling sedikit 13 tahun sebagai anggota POLRI.

Motto perjuangan : "Sanyata Sumanasa Wira " , yang berarti kebenaran adalah tujuan jiwa pengabdian Perwira POLRI.

Sesko ABRI Bagian Kepolisian merupakan bagian yang integral dari pada SESKO ABRI.

III. PENDIDIKAN PENGEMBANGAN SPESIALISASI, merupakan pendidikan formil untuk mengembangkan kemampuan spesialisasi yang diperoleh dari siklus pendidikan-latihan - penugasan sebelumnya, dalam rangka proyeksi penggunaan personil selanjutnya :

1. Pendidikan kejuruan, yang ditujukan untuk memperdalam penguasaan suatu bidang pekerjaan tertentu, baik bagi Perwira, Bintara maupun Tamtama. Pendidikan kejuruan yang telah diadakan dilingkungan POLRI misalnya:

Perwira : - Pendidikan Kamra
- Pendidikan Samapta
- Pendidikan Reserse Nar-kotika
- Pendidikan Bah. Inggris
- Pendidikan Lalu - Lintas

Bintara : - Pendidikan Resmob
- Pendidikan Penyidik Perkara
- Pendidikan Bela Diri
- Pendidikan Pembukuan

- Pendidikan Keuangan
- Pendidikan Provoost
- Pendidikan Instruktur
- Pendidikan Lalu Lintas

Tamtama : - Pendidikan Musik
- Pendidikan Aswasada
- Pendidikan Perhubungan
- Pendidikan Lalu Lintas

2. Pendidikan Jabatan, yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dalam jabatan tertentu.

a. Sekolah Komando Kepolisian (SEKO-POL), mempunyai tugas untuk membentuk Perwira2 POLRI yang mempunyai kecakapan, kemampuan serta ketrampilan didalam memimpin dan membina eselon organisasi yang setingkat dengan Komando Resort Kepolisian.

Scope dari pada pendidikan Sekopol difokuskan/diarahkan pada pengembangan faktor2 mental - Psychologis serta penguasaan tehnik dan taktis melaksanakan tugas dalam jabatan.

Peserta pendidikan terdiri dari Perwira berpangkat Mayor Polisi yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

b. Pendidikan Perwira Bendaharawan Materiil, yang dimaksudkan untuk membentuk personil POLRI khususnya Bendaharawan Materiil POLRI, cukup memiliki pengertian, tanggung jawab dan kesadaran akan ketertiban administrasi, khususnya dalam bidang logistik.

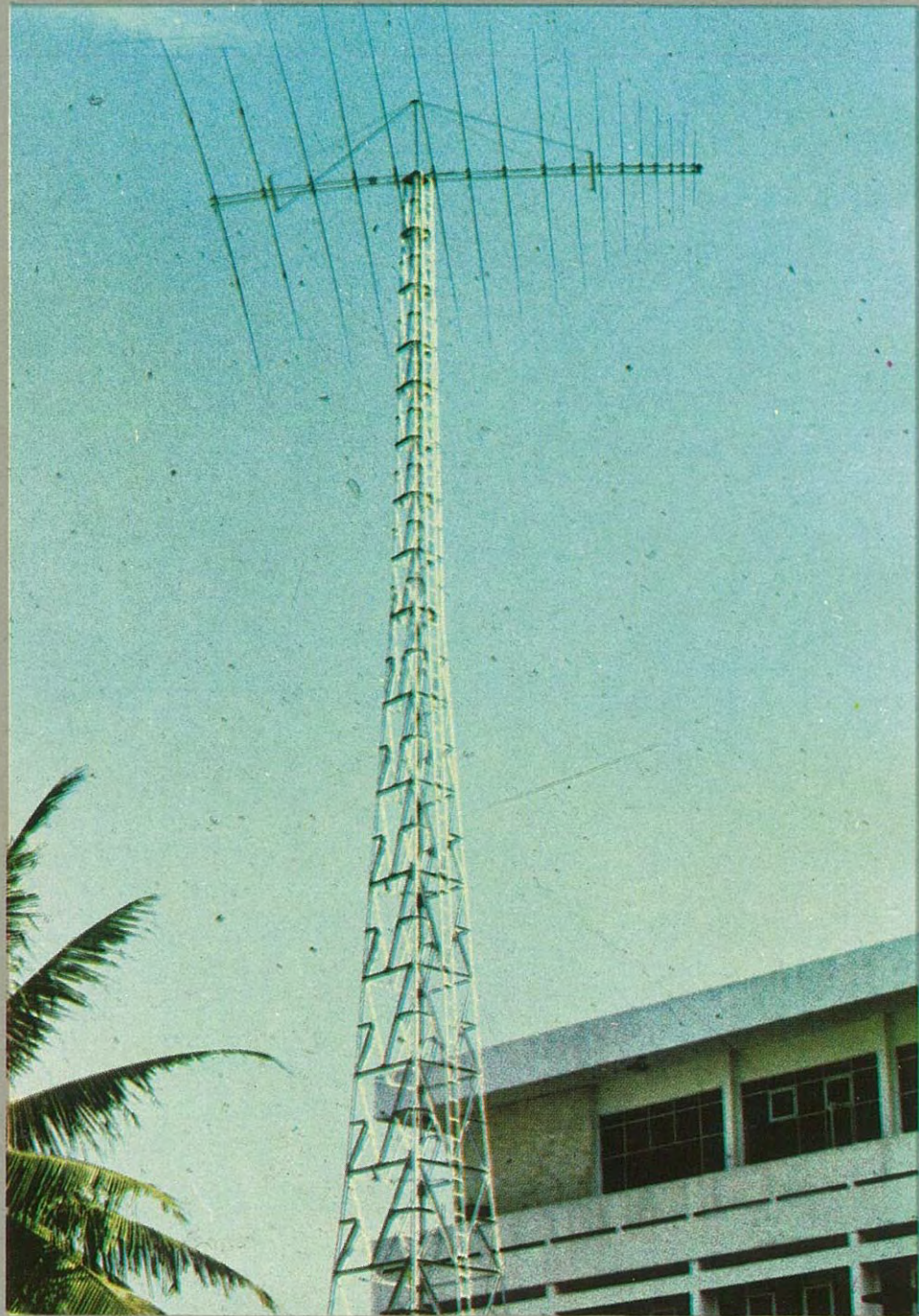


Korps Musik POLRI memegang peranan penting dalam upacara-2. Untuk itu diperlukan latihan-2 secara teratur.

IV. PENDIDIKAN PERALIHAN :

Pendidikan ini berlangsung selama 1 bulan, ditujukan untuk melengkapi aspek pembentukan keperwiraan bagi personil MILWA (Militer Wajib) yang telah selesai masa wajibnya dan disetujui permohonannya untuk beralih status MILSUK (Militer Sukarela).

LAIN-LAIN 6



Sebuah antena, yang sangat diperlukan dalam sistem komunikasi jarak jauh.

LAIN-LAIN

a. KOMUNIKASI DAN ELEKTRONIKA POLRI

Dinas Perhubungan POLRI mendapat tugas menyediakan sarana komunikasi jarak jauh untuk memberikan dukungan terhadap tugas operasional dan kegiatan-kegiatan POLRI lainnya. Komunikasi jarak jauh diperlukan sebagai sarana komando dan pengendalian (KODAL) serta untuk pembinaan kekuatan (bidang administrasi dan logistik).

Dinas Perhubungan POLRI menyediakan sarana komunikasi telepon dan telegraf melalui radio dan komunikasi melalui kawat yang disusun menurut sistim sbb :

1. Sistim komunikasi Markas untuk menyediakan sarana komunikasi dilingkungan Markas2 POLRI.
2. Sistim Komunikasi Wilayah untuk menyediakan sarana komunikasi antara Markas Besar dengan Markas2 Komando Kewilayahan.
3. Sistim Komunikasi Operasi untuk menyediakan sarana komunikasi bagi satuan-satuan operasional POLRI.
4. Sistim Komunikasi Khusus untuk menyediakan sarana komunikasi bagi tugas2 khusus.

Sejalan dengan meningkatnya tugas POLRI dan sesuai kemajuan teknologi, Dinas perhubungan terus berusaha meningkatkan kemampuan teknisnya dalam menyediakan sarana2 komunikasi yang dapat diandalkan (reliable) bagi kepentingan tugas2 POLRI disegala bidang.

b. C O M P U T E R

Sejak tahun 1967 POLRI telah dilengkapi dengan satu Unit Computer merk IBM, sistim 360-s model D-30, yang dipergunakan sebagai sarana membantu dalam tugas2 pembinaan, baik



Salah satu peralatan komunikasi yang digunakan untuk mengadakan hubungan jarak jauh.



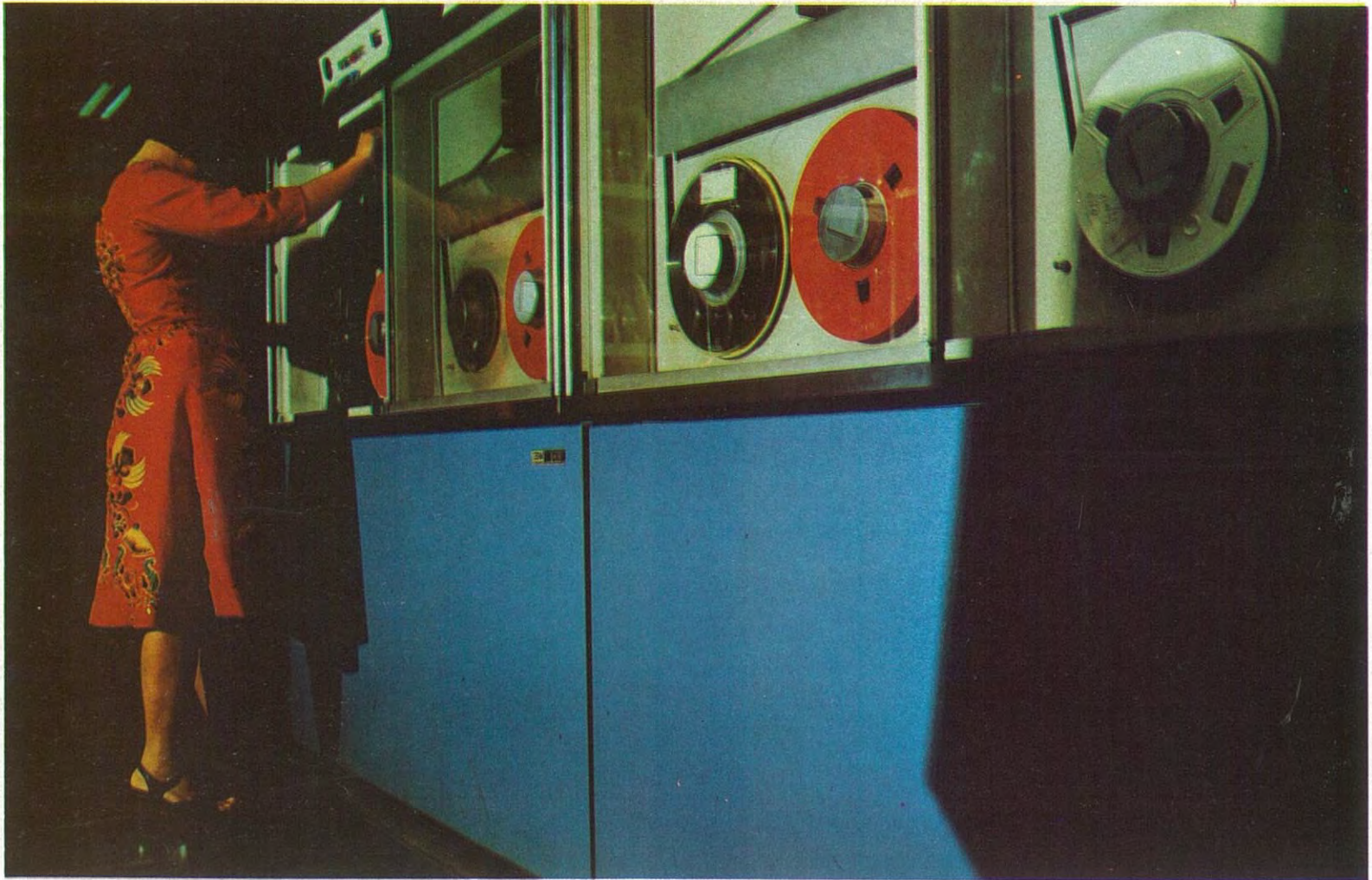
Call sign dan wiring system memudahkan mendapatkan hubungan.



Salah satu ruang Pengumpulan dan Pengolahan Data dimana terdapat peralatan Computer, yang merupakan perlengkapan modern bagi POLRI.

personil, materiil, operasionil maupun keuangan.

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi, dalam waktu dekat Computer POLRI akan dilengkapi dengan CMC-5 (Key to Tape).



Salah seorang petugas sedang melayani alat computer.



Dengan alat computer ini, pengumpulan dan pengolahan data akan dapat dilakukan secara cepat dan tepat.

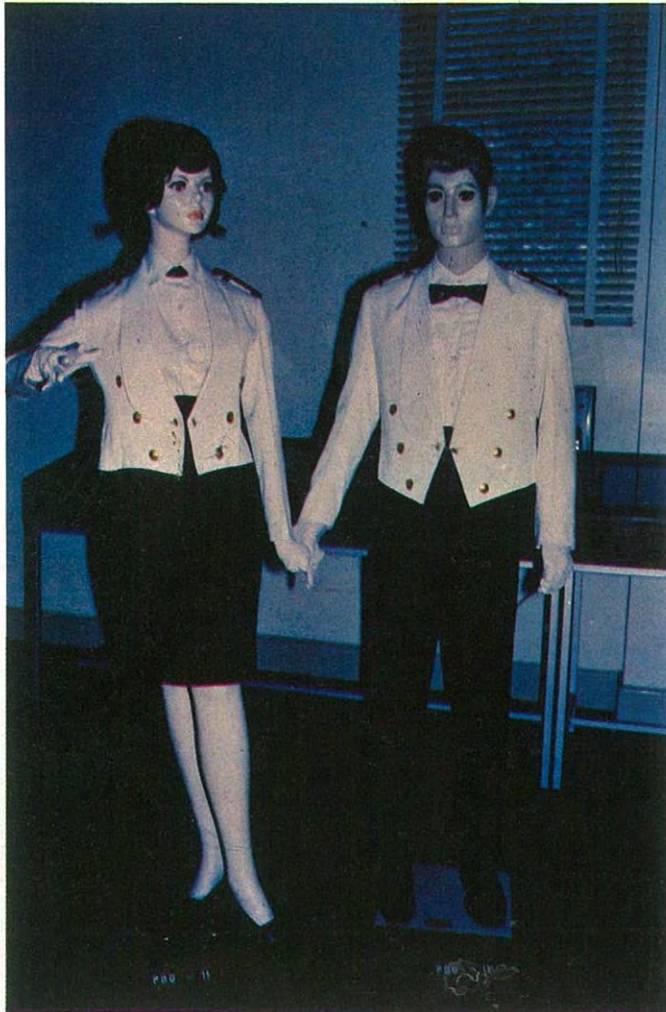
c. PAKAIAN SERAGAM POLRI

Sesuai dengan Surat Keputusan Kapolri No.Pol.Skep/08/II/1972 tanggal 10 Februari 1972, pakaian seragam POLRI terdiri atas :

1. Pakaian Dinas Harian (PDH)
2. Pakaian Dinas Lapangan (PDL), yang terdiri atas :
 - a. Pakaian Dinas Lapangan I
 - b. Pakaian Dinas Lapangan II



3. Pakaian Dinas Upacara (PDU), yang terdiri dari :
- a. Pakaian Dinas Upacara I (PDU - I)
 - b. Pakaian Dinas Upacara II (PDU - II)
 - c. Pakaian Dinas Upacara III (PDU -III)
 - d. Pakaian Dinas Upacara IV (PDU - IV)
4. Pakaian Dinas Upacara Parade (PDUP).



d. KEPANGKATAN POLRI

DASAR : - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1973 tanggal 21 Mei 1973.
- Lembaran Negara Nomor 30 tahun 1973.
- Tambahan Lembaran Negara Nomor 3006 tahun 1973.

TAMTAMA : 1. Bhayangkara Dua
2. Bhayangkara Satu
3. Koprал Dua
4. Koprал Satu

BINTARA : 5. Sersan Dua
6. Sersan Satu
7. Sersan Kepala
8. Sersan Mayor
9. Pembantu Letnan Dua
10. Pembantu Letnan Satu
11. Calon Perwira

PERWIRA PERTAMA :

12. Letnan Dua
13. Letnan Satu
14. Kapten

PERWIRA MENENGAH :

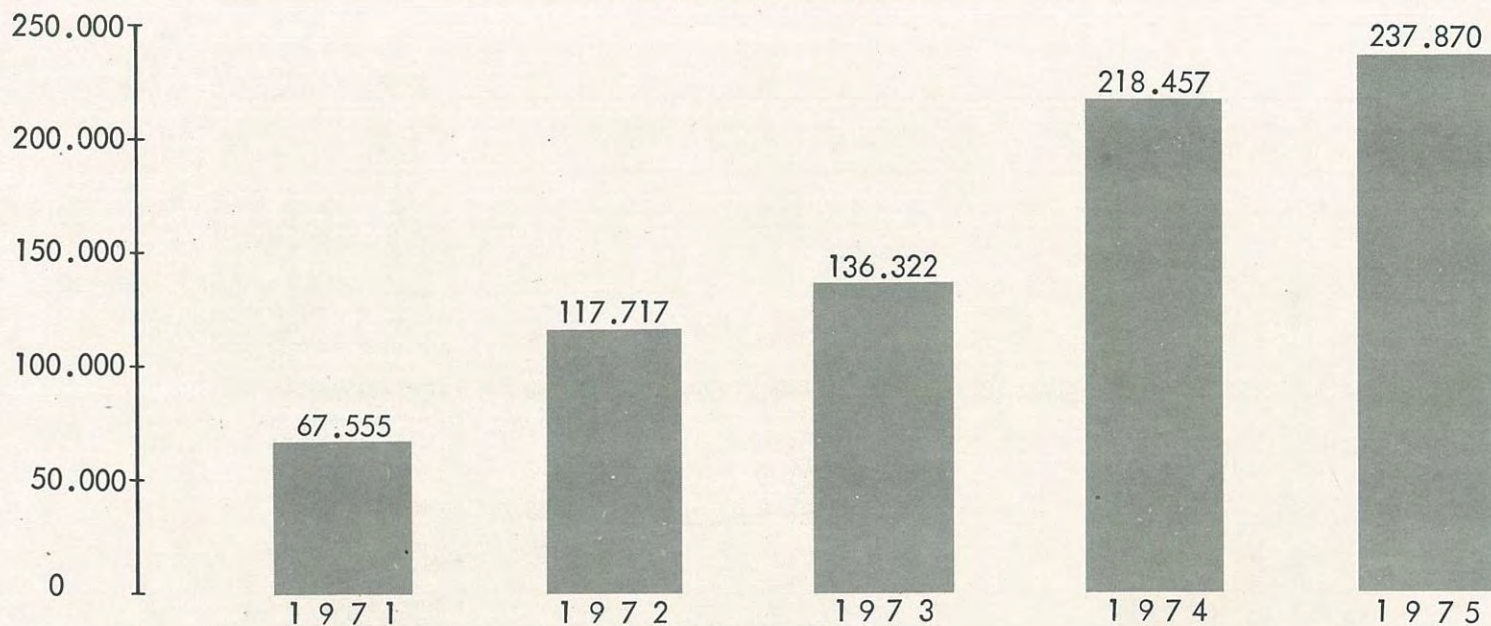
15. Mayor
16. Letnan Kolonel
17. Kolonel

PERWIRA TINGGI :

18. Brigadir Jenderal Polisi
19. Mayor Jenderal Polisi
20. Letnan Jenderal Polisi
21. Jenderal Polisi

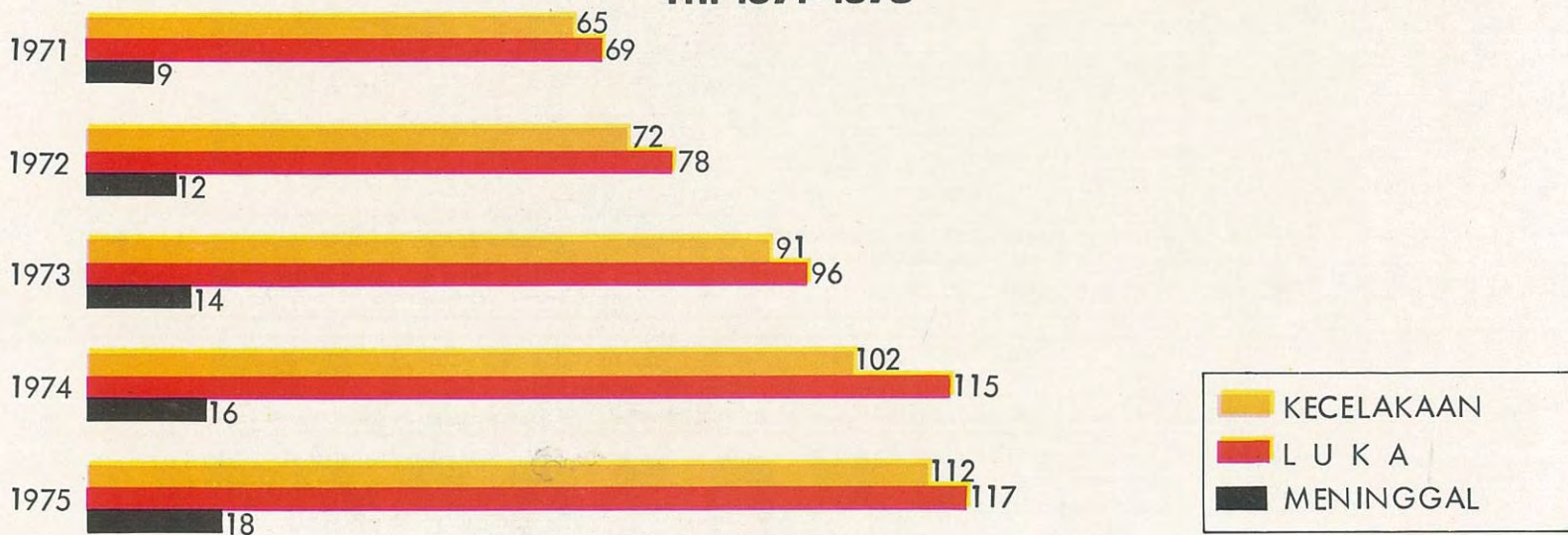
BANYAKNYA PELANGGARAN LALU-LINTAS DI SELURUH INDONESIA

TH. 1971-1975



ANGKA RATA2 SETIAP HARI MENGENAI JUMLAH KECELAKAAN LALU-LINTAS, YANG LUKA2 DAN MENINGGAL DI SELURUH INDONESIA

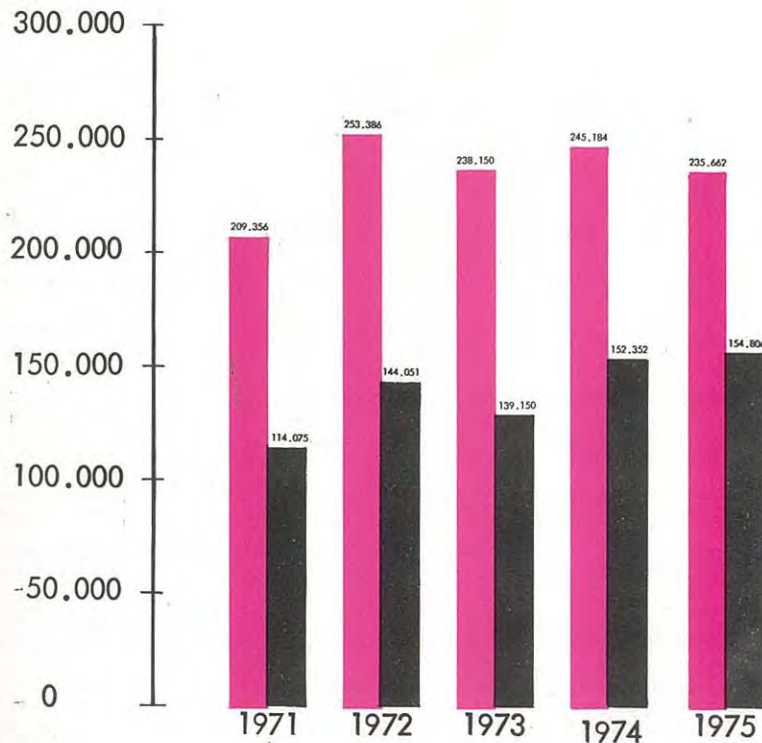
TH. 1971-1975



e. S T A T I S T I K

ANGKA KEJAHATAN DI INDONESIA

TH. 1971 - 1975



Statistik2 :

1. Pelanggaran Lalu Lintas tahun 1971-1975
2. Jumlah kecelakaan, yang luka dan yang meninggal setiap hari tahun 1971-1975
3. Angka Kejahatan dan penyelesaiannya tahun 1971 - 1975
4. Perbandingan jumlah penduduk - Polisi.

**PERBANDINGAN JUMLAH
PENDUDUK - POLISI**

PENDUDUK - 1975 : 128.800.424

P O L I S I - 1975 : 107.559

